

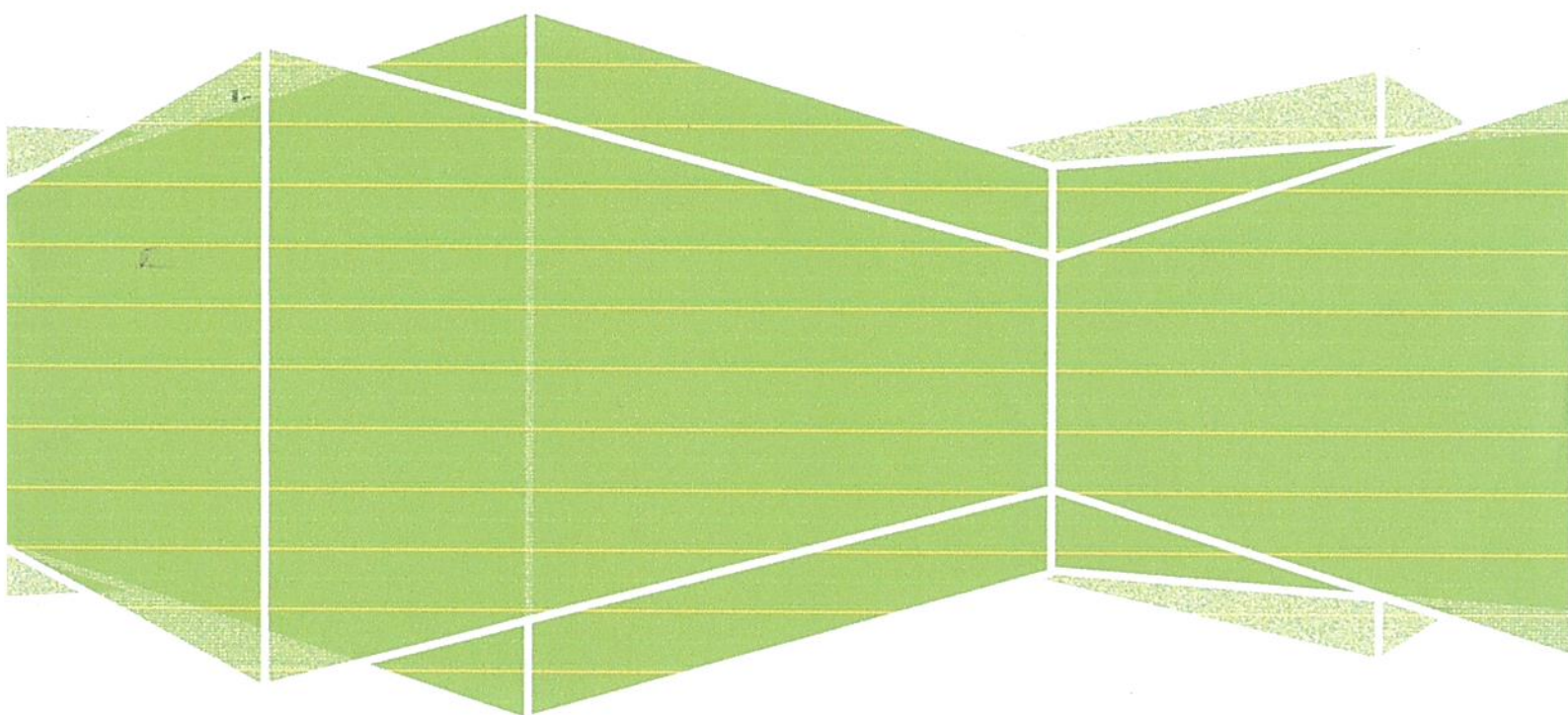
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

LAPORAN KEUANGAN

Semester II

Periode 2020

Kode Satker 401909





LAPORAN KEUANGAN
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN
BALAI

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. HM. Asyik Aqil KM. 16 Sukajadi Talang Kelapa

Banyuasin - Sumatera Selatan

Telp/Fax. (0711) 5723669

e-mail : pn-pangkalanbalai@gmail.com

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pangkalan Balai, 04 Januari 2020

**Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,**

ENDANG EFENDI, S.E., M.M.
NIP.19840913 200904 1 002

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel dan Lampiran.....	1
Pernyataan Tanggung Jawab.....	iii
Ringkasan.....	10
I. Laporan Realisasi Anggaran.....	14
II. Neraca.....	16
III. Laporan Operasional.....	19
IV. Laporan Perubahan Ekuitas.....	21
V. Catatan atas Laporan Keuangan.....	23
A. Penjelasan Umum.....	23
A.1. Dasar Hukum.....	23
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.....	24
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	25
A.4. Basis Akuntansi.....	25
A.5. Dasar Pengukuran.....	26
A.6. Kebijakan Akuntansi.....	26
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	33
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah.....	33
B.2. Belanja.....	33
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca.....	35
C.1. Aset Lancar.....	35
C.2. Aset Tetap.....	36
C.5. Kewajiban Jangka Pendek.....	37
C.6. Ekuitas.....	38
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional.....	38
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	38
D.2. Beban Pegawai.....	38
D.3. Beban Persediaan.....	38

D.4.	Beban Barang dan Jasa.....	39
D.5.	Beban Pemeliharaan.....	39
D.6.	Beban Perjalanan Dinas.....	39
D.7.	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat.....	39
D.8.	Beban Bantuan Sosial.....	39
D.9.	Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	40
D.10.	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih.....	40
D.11.	Beban Lain-lain.....	40
D.12.	Kegiatan Non Operasional.....	40
D.13.	Pos Luar Biasa.....	40
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	41
E.1.	Ekuitas Awal.....	41
E.2.	Surplus (defisit) LO.....	41
E.3. 1.	Penyesuaian Nilai Aset.....	41
E.3. 2	Koreksi Nilai Persediaan.....	41
E.3. 3	Selisih Revaluasi Aset Tetap.....	41
E.3. 4	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi.....	41
E.3. 5	Koreksi Lain-lain.....	42
E.3.	Ekuitas Akhir.....	42
F.	Pengungkapan Penting Lainnya.....	42
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca.....	42
F.2.	Pengungkapan Lain-lain.....	42

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel dan Lampiran

Tabel 1 Ringkasan Neraca per 2020 dan 2019;	11
Tabel 2 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 31 Desember 2020	33
Tabel 3 Perbandingan realisasi PNBPN per 31 Desember 2020 dan 2019	33
Tabel 4 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2020 T.A 2020	34
Tabel 5 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember T.A 2020	34

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

Jalan Kolonel Barlian Bandar Jaya Pangkalan Balai - Sumatera Selatan 31414

Telp/fax : (0711)-5723669 e-mail : pn-pangkalanbalai@gmail.com

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Semester II Tahun 2020 yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pangkalan Balai, 04 Januari 2020

**Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,**

ENDANG EEENDI, S.E., M.M.
NIP.19840913-200904 1 002

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Semester II Tahun 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2020 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, yang terdapat dalam periode tersebut. Untuk Belanja, dimana Jumlah Belanja dengan pagu awal 27.300.884.000,- (*dua puluh tujuh milyar tiga ratus juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah*) setelah direvisi menjadi 9.763.239.000,- (*sembilan milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*) dengan anggaran terealisasi pada semester II sebesar Rp. 9.519.915.962,- (*sembilan milyar lima ratus sembilan belas juta sembilan ratus lima belas ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah*)

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2020

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset Semester II Tahun 2020 per 31 Desember 2020 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp15.238.000,-(lima belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah); Kewajiban sebesar Rp22.350.904,-(dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu sembilan ratus empat rupiah) dan Ekuitas sebesar Rp.8.937.279.271,-(delapan milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh satu rupiah)

Ringkasan Neraca per 2020 dan 2019 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 1 Ringkasan Neraca per 2020 dan 2019 (dalam satuan Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2020	2019	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	21,848,000	(21,848,000)	(100.00)
Persediaan	15,238,000	0	15,238,000	0.00
JUMLAH ASET LANCAR	15,238,000	21,848,000	(6,610,000)	(30.25)
ASET TETAP				
Tanah	2,819,580,000	1,104,441,000	1,715,139,000	155.29
Peralatan dan Mesin	958,157,620	859,757,620	98,400,000	11.44
Gedung dan Bangunan	383,657,000	383,657,000	0	0.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5,255,677,115	0	5,255,677,115	0.00
Akumulasi Penyusutan	(472,679,560)	(241,108,003)	(231,571,557)	96.04
JUMLAH ASET TETAP	8,944,392,175	2,106,747,617	6,837,644,558	324.55
JUMLAH ASET	8,959,630,175	2,128,595,617	6,831,034,558	320.91
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	22,350,904	2,948,036	19,402,868	658.16
Uang Muka dari KPPN	0	21,848,000	(21,848,000)	(100.00)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	22,350,904	24,796,036	(2,445,132)	(9.86)
JUMLAH KEWAJIBAN	22,350,904	24,796,036	(2,445,132)	(9.86)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	8,937,279,271	2,103,799,581	6,833,479,690	324.81
JUMLAH EKUITAS	8,937,279,271	2,103,799,581	6,833,479,690	324.81
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	8,959,630,175	2,128,595,617	6,831,034,558	320.91

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pada laporan

Semester II Tahun 2020, pendapatan Operasional sebesar Rp0, Beban Operasional Rp.4.401.276.035,-(*empat milyar empat ratus satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tiga puluh lima rupiah*) Surplus / (Defisit)-LO sebesar Rp. (4.400.835.035),-(*minus empat milyar empat ratus juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tiga puluh lima rupiah*)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas yang berakhir pada periode 31 Desember 2020 dimana Ekuitas Awal sebesar Rp.2.103.799.581,-(*dua milyar seratus tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah*) Surplus/(Defisit)-LO sebesar Rp.(4.400.835.035),-(*minus empat milyar empat ratus juta delapan ratus tiga puluh lima juta tiga puluh lima rupiah*) dan Ekuitas akhir sebesar Rp8.937.279.271,-(*delapan milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah*)

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode tahun 2020, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Catatan	TA.2020		
		Anggaran	Realisasi	%
A. Pendapatan Negara dan Hibah	B.1			
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	0	0	0,00
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		0	0	0,00
B. Belanja Negara	B.2			
1. Belanja Pegawai	B.2.1.	3.451.053.000	3.288.783.543	95,30
2. Belanja Barang	B.2.2.	901.682.000	877.055.304	97,27
3. Belanja Modal	B.2.3.	5.410.504.000	5.354.077.115	98,96
Jumlah Belanja Negara		9.763.239.000	9.519.915.962	97,51

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
NERACA
PER 31 DESEMBER 2020
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2020
ASET		
Aset Lancar	C.1	
Kas dan Bank		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	0
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1. 2.	0
Persediaan	C.1. 3.	15.238.000
Jumlah Aset Lancar		15.238.000
Aset Tetap	C.2	
Tanah	C.2. 1.	2.819.580.000
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	958.157.620
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	383.657.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2. 6.	5.255.677.115
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 7.	(472.679.560)
Jumlah Aset Tetap		8.944.392.175
Jumlah Aset		8.944.392.175
KEWAJIBAN		
Kewajiban Jangka Pendek	C.5	
Utang kepada pihak ketiga	C.5. 1.	22.350.904
Uang Muka dari KPPN	C.5. 2.	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		22.350.904
Jumlah Kewajiban		22.350.904

EKUITAS

Ekuitas	C.6	8.937.279.271
	Jumlah Ekuitas	8.937.279.271
	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	8.959.630.175



III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 Desember 2020 DAN 2019
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2020	2019	Jumlah	%
1	2	3	4	5
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN PERPAJAKAN				
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	0.00
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mevah	0	0	0	0.00
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	0.00
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	0.00
Pendapatan Cukai	0	0	0	0.00
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	0.00
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	0.00
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	0.00
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0.00
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK				
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0.00
Pendapatan Dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	0	0	0	0.00
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	251,680	(251,680)	(100.00)
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	251,680	(251,680)	(100.00)
PENDAPATAN HIBAH				
Pendapatan Hibah	0	0	0	0.00
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	0.00
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	0	251,680	(251,680)	(100.00)
BEBAN OPERASIONAL				
Beban Pegawai	3,306,711,306	2,587,706,878	719,004,428	27.78
Beban Persediaan	18,178,000	16,973,000	1,205,000	7.09
Beban Barang dan Jasa	627,563,637	346,427,832	281,135,805	81.15
Beban Pemeliharaan	175,480,671	94,588,033	80,892,638	85.52
Beban Perjalanan Dinas	41,770,864	21,660,000	20,110,864	92.84
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	0.00
Beban Bunga	0	0	0	0.00
Beban Subsidi	0	0	0	0.00
Beban Hibah	0	0	0	0.00
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	231,571,557	169,543,770	62,027,787	36.58
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	0.00
Beban Transfer	0	0	0	0.00
Beban Lain-Lain	0	0	0	0.00
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	4,401,276,035	3,236,899,513	1,164,376,522	35.97
SURPLUS(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(4,401,276,035)	(3,236,647,833)	(1,164,628,202)	(35.98)
KEGIATAN NON OPERASIONAL				

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2020	2019	Jumlah	%
1	2	3	4	5
SURPLUS (DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR				
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0.00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0.00
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0.00
SURPLUS (DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0.00
Jumlah Surplus/(defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0.00
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA				
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	603,000	7,675,000	(7,072,000)	(92.14)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	162,000	15,000	147,000	980.00
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	441,000	7,660,000	(7,219,000)	(94.24)
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	441,000	7,660,000	(7,219,000)	(94.24)
POS LUAR BIASA				
Beban Luar Biasa	0	0	0	0.00
SURPLUS (DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA	0	0	0	0.00
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(4,400,835,035)	(3,228,987,833)	(1,171,847,202)	(36.29)

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 Desember 2020 DAN 2019
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019	Jumlah	%
1	2	3	4	5
EKUITAS AWAL	2,103,799,581	0	2,103,799,581	0.00
SURPLUS/DEFISIT - LO	(4,400,835,035)	(3,228,987,833)	(1,171,847,202)	36.29
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KE SALAHAN MENDASAR	0	(25,742,498)	25,742,498	(100.00)
Penyesuaian Nilai Aset	0	0	0	0.00
Koreksi Nilai Persediaan	0	0	0	0.00
Koreksi Atas Reklasifikasi	0	(22,771,650)	22,771,650	(100.00)
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0	0	0	0.00
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	0	0	0	0.00
Koreksi Lain-lain	0	(2,970,848)	2,970,848	(100.00)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	11,234,314,725	5,368,529,912	5,875,784,813	109.65
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	6,833,479,690	2,103,799,581	4,729,680,109	224.81
EKUITAS AKHIR	8,937,279,271	2,103,799,581	6,833,479,690	324.81



V. *CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN*



V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Pusat
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan, melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Tahun 2020 merupakan bagian dari rencana strategis Mahkamah Agung dimana pelaksanaan dan perencanaan sudah berbasis kinerja. Program dan kegiatan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada mengacu pada program-program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung dan dituangkan dalam visi dan misi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

Untuk mewujudkan tujuan di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berkomitmen dengan visi :

1. *Menjaga Kemandirian*

2. *Pelayanan Hukum yang berkeadilan*
3. *Meningkatkan Kredibilitas Profesional dan Transparansi*
4. *Pelayanan yang Efektif, Efisien dan Transparansi*

Untuk mewujudkan visi tersebut akan dilakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Memberikan Fungsi Kekuasaan Kehakiman Secara Efektif dan Efisien.
- Memberikan pelayanan hukum yang mempunyai kepastian dan berkeadilan.
- Menciptakan kredibilitas profesional dan transparansi.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester II Tahun 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan	100%

pelunasan

2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia
Urusan Piutang Negara/DJKN

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusunan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software Komputer</i>	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - (1.) Kewajiban Jangka Pendek
 - (2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
 - (3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - (4.) Kewajiban Jangka Panjang
 - (5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung..

(7.) **Ekuitas**

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi
Pendapatan
Negara
dan
Hibah :
Rp
0

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.0 atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 0. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Tabel 2 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	0	0
	Total Pendapatan	0	0	0

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 0 atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 0.

Perbandingan realisasi PNBP TA 2020 dan 2019 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3 Perbandingan Realisasi PNBP per31 Desember 2020 dan 2019
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2020	2019	Perubahan	
				Rp	%
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	7.926.680	7.926.680	0
	Total Pendapatan	0	7.926.680	7.926.680	0

B.2. Belanja

Realisasi
Belanja
Negara :
Rp
9.519.175.7
25

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Negeri Pangkalan Balai per 31 Desember TA 2020 adalah sebesar Rp. 9.519.175.725,-(sembilan milyar lima ratus sembilan belas juta seratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) anggaran senilai Rp. 9.763.239.000,-(sembilan milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2020 dapat dilihat

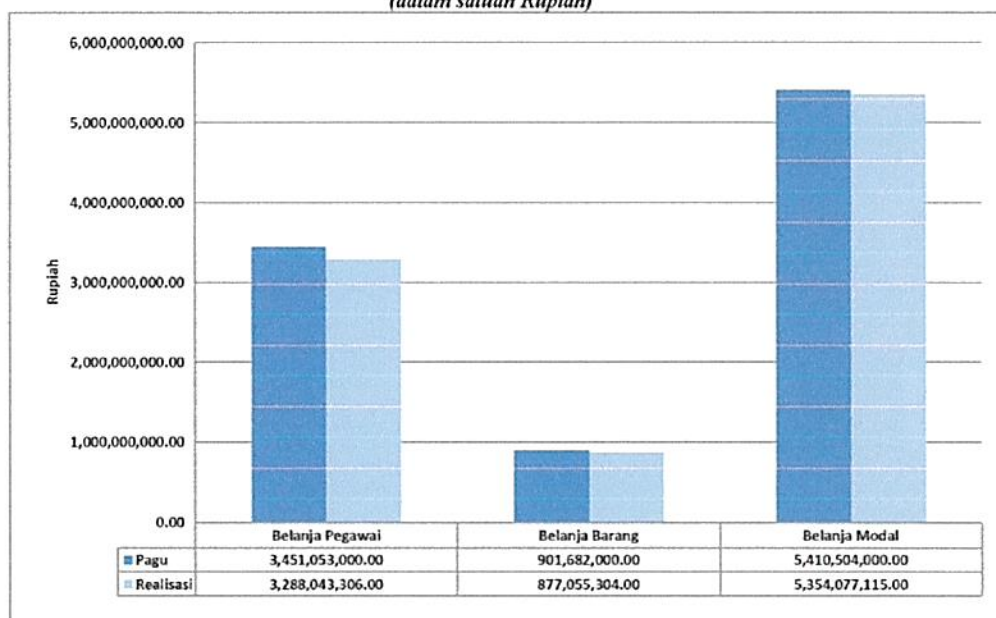
pada tabel berikut ini :

Tabel 4 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2020 TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 September TA 2019		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	3.451.053.000	3.288.043.306	95.28
Belanja Barang	901.682.000	877.055.304	97.27
Belanja Modal	5.410.504.000	5.354.077.115	98.96
Total Belanja Bruto	9.763.239.000	9.519.175.725	97.50

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2020
(dalam satuan Rupiah)



Realisasi Belanja Negara Pengadilan Negeri Pangkalan Balai per 31 Desember 2020 TA 2020 adalah sebesar Rp. 9.519.175.725,-(sembilan milyar lima ratus sembilan belas juta seratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) atau sebesar 97.50% dari anggaran senilai Rp. 9.763.239.000,-(sembilan milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai : Rp 3.451.053.000 Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Negeri Pangkalan Balai per 31 Desember 2020 TA 2020 Rp. 3.288.043.306,-(*tiga milyar dua ratus delapan puluh delapan juta empat puluh tiga ribu tiga ratus enam rupiah*) dari anggaran awal sebesar Rp.3.451.053.000,-(*tiga milyar empat ratus lima puluh satu juta lima puluh tiga ribu rupiah*)

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang : Rp 877.055.304 Realisasi Belanja Barang Pengadilan Negeri Pangkalan Balai per 31 Desember 2020 TA 2020 sebesar Rp.877.055.304,-(*delapan ratus tujuh puluh tujuh juta lima puluh lima ribu tiga ratus empat rupiah*) dari anggaran sebesar Rp.901.682.000,-(*sembilan ratus satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah*)

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal :Rp 5.354.077.115 Realisasi Belanja Modal Pengadilan Negeri Pangkalan Balai per 31 Desember 2020 dan TA 2020 adalah Rp.5.354.077.115,-(*lima milyar tiga ratus lima puluh empat juta tujuh puluh tujuh ribu seratus lima belas rupiah*) dari anggaran Rp.5.410.504.000,-(*lima milyar empat ratus sepuluh juta lima ratus empat ribu rupiah*)

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar: Rp15.238.000

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 15.238.000,-(*lima belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*)

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran: Rp 0

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 sebesar Rp.0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

C.1.2. Belanja Dibayar di Muka

Belanja Dibayar di Muka: Rp

Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2020 sebesar Rp.22.350.904,-(*dua puluh dua*

22.350.904,- juta tiga ratus lima puluh ribu sembilan ratus empat rupiah). Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima.

C.1.3. Persediaan

*Persediaan:
Rp 15.238.000* Persediaan periode 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.15.238.000,-(*lima belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*). Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

C.2. Aset Tetap

*Aset Tetap :
Rp
8.944.392.175* Nilai Aset Tetap periode 31 Desember 2020 tersaji sebesar Rp 8.944.392.175,-(*delapan milyar sembilan ratus empat puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu seratus tujuh puluh lima rupiah*). Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

C.2.1. Tanah

*Tanah:
Rp2.819.580.000* Nilai Aset Tetap berupa Tanah periode 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 2.819.580.000,-(*dua milyar delapan ratus sembilan belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah*)

C.2.2. Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan
Mesin : Rp
958.157.620* Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin periode 31 Desember 2020 sebesar Rp.958.157.620,-(*sembilan ratus lima puluh delapan juta seratus lima puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh rupiah*)

C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan : Rp
383.657.000* Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan periode 31 Desember 2020 sebesar 383.657.000,- (*tiga ratus delapan puluh tiga juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah*)

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

Aset Jalan , Irigasi, dan Jaringan : Rp 0 Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2020 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya: Rp 8.944.392.175 Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya periode 31 Desember 2020 sebesar Rp.8.944.392.175,-(*delapan milyar sembilan ratus empat puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu seratus tujuh puluh lima rupiah*)

C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan : Rp 5.255.677.115 Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan periode 31 Desember 2020 sebesar Rp5.255.677.115,-(*lima milyar dua ratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima belas rupiah*)

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset tetap : Rp.(472.679.560) Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap periode 31 Desember 2020 sebesar Rp(**472.679.560**),-(*empat ratus tujuh puluh dua ribu dua enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh ribu rupiah*)

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek : Rp22.350.904 Nilai Kewajiban Jangka Pendek periode 31 Desember 2020 sebesar Rp.22.350.904,- (*dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu sembilan ratus empat rupiah*)

C.5.1. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN: Rp 0 Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0,- Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun

pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.6. Ekuitas

Ekuitas:
Rp
8.937.279.271,- Ekuitas periode 31 Desember 2020 sebesar sebesar Rp8.937.279.271,-(*delapan milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah*) Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan
PNbp : Rp0 Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp Rp 0.

D.2. Beban Pegawai

Beban
Pegawai : Rp
3.306.711.306 Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp 3.306.711.306-(*tiga milyar tiga ratus enam juta tujuh ratus selas ribu tiga ratus enam rupiah*) Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

D.3. Beban Persediaan

Beban
Persediaan : Rp
18.178.000. Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 18.178.000,-(*delapan belas juta seratus tujuh puluh delapan juta*) dan Rp 16.973.000,-(*enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah*) Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Jasa : Rp
627.563.637*

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 Rp 627.563.637,-(enam ratus dua puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah). Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan:
Rp 175.480.671*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp 175.480.671,-(seratus tujuh puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah). Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas :
Rp41.770.864*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.41.770.864,-(empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat :
Rp 0*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

D.8. Beban Bantuan Sosial

*Beban Bantuan
Sosial : Rp 0*

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi : Rp
231.571.557*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 231.571.557,-(*dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah*) Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

*Beban
Penyisihan
Piutang tak
Tertagih : Rp 0*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

D.11. Beban Lain-lain

*Beban Lain-
Lain : Rp 0*

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp 0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

D.12. Kegiatan Non Operasional

*Beban Kegiatan
Non
Operasional :
Rp441.000*

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Beban kegiatan non oprasional untuk periode 31 Desember 2020 adalah Rp 441.000,-(*empat ratus empat puluh satu ribu rupiah*)

D.13. Pos Luar Biasa

*Beban Pos Luar
Biasa : Rp 0*

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Pos Luar Biasa untuk periode 31 Desember 2020 adalah Rp. 0,-

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 2.103.799.581,- (*dua milyar seratus tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah*)

E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp (4.400.835.035),- (*minus empat milyar empat ratus juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tiga puluh lima rupiah*) dan Rp(3.228.987.833),- (*minus tiga milyar dua ratus dua puluh delapan ribu tiga sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah*). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir.

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 0 Dan Rp 0.

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

- Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

- Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020

dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp (2.970.848),- (*minus dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah*) Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

E.3.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 8.937.279.271,- (*delapan milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah*) dan Rp. 2.103.799.581,- (*dua milyar seratus tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh satu rupiah*)

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak ada temuan dan tindak lanjut temuan BPK yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan ini.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Tidak ada informasi pendapatan dan belanja secara akrual dalam laporan keuangan ini.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah:

1. BRI Cabang Pangkalan Balai A/C 110001000497305 a.n. BPG 160 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI 01 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA
2. BRI Cabang Pangkalan Balai A/C 110001000496309 a.n. BPG 160 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI 03 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILUM
3. Bank BRI (Persero) Cabang Pangkalan Balai A/C 110001000489302 a.n. RPL 160 PN P Balai Utk Biaya Perkara yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3

F.2.4. Revisi DIPA

1. Revisi I tertanggal 27 Februari 2020;
2. Revisi II tertanggal 29 April 2020;
3. Revisi III tertanggal 02 Juli 2020;
4. Revisi IV tertanggal 24 Agustus 2020;
5. Revisi V tertanggal 10 November 2020;
6. Revisi VI tertanggal 01 Desember 2020;
7. Revisi VII tertanggal 16 Desember 2020;
8. Revisi VII tertanggal 23 Desember 2020;

F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Tidak ada informasi mengenai Ralat SPM, SP2D, SSBP, SSPB yang dapat dijabarkan dalam laporan keuangan ini.

F.2.6. Catatan Penting Lainnya

-Nihil-

LAPORAN PENDUKUNG

KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT SATKER
PERIODE TA. 2020

Kode BA dan Nama BA : (005) MAHKAMAH AGUNG RI
 Kode Es1 dan Nama Es1: (01) Badan Urusan Administrasi
 Kode Wilayah dan Nama Wilayah: (1100) Sumatera Selatan
 Kode Satker dan Nama Satker: (401909)Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

Objek Penelaahan	Kondisi LK		Seharusnya
<i>Beri tanda centang (✓) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>			
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>			
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN			
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok (Hardcopy)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Pernyataan Tanggung Jawab	✓		Ada
2. LRA, Neraca, LO dan LPE <i>face</i>	✓		Ada
3. Catatan atas Laporan Keuangan	✓		Ada
Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Neraca Percobaan Akrua	✓		Ada
2. Neraca Percobaan Kas	✓		Ada
3. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja	✓		Ada
KESESUAIAN LAPORAN HARDCOPY DENGAN E-REKON&LK			
	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Apakah semua <i>face</i> laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan e-Rekon&LK termasuk perbandingan dengan tahun 2019?	✓		Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan e-Rekon&LK sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>			
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI			
Neraca Balance	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Satker Neracanya tidak <i>balance</i> ? Cek di e-Rekon&LK melalui menu "Daftar >> Neraca Tidak Balance "		✓	Tidak
Saldo antar Laporan	Sama	Tidak	Seharusnya
2. Apakah Nilai " <i>Surplus/(Defisit)-LO</i> " di LO = Nilai " <i>Surplus/ (Defisit) - LO</i> " di LPE	✓		Sama
3. Apakah Saldo " <i>Ekuitas Akhir</i> " di LPE = " <i>Saldo Ekuitas</i> " di Neraca	✓		Sama
<i>Apabila terjadi, biasanya karena ada akun-akun yang tidak ada dalam Referensi sehingga tidak terkalkulasi</i>			
NERACA PERCOBAAN AKRUAL			
PENGECEKAN SALDO YANG TIDAK NORMAL DAN TIDAK ADA REFERENSINYA	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun dengan uraian "null" atau "uraian tidak ada" ? (Cek di e-Rekon&LK, menu <i>Daftar >> Akun Non Ref</i>)		✓	Tidak
2. Adakah "Saldo Tidak normal"? (Cek e-Rekon&LK, menu " <i>Daftar >> Saldo Tidak Normal</i> "), kecuali akun " <i>Beban Penyisihan Piutang</i> " dan " <i>Kas dan Bank BLU Belum Disahkan</i> "		✓	Tidak
TELAHAH PER AKUN PADA NERACA PERCOBAAN			
AKUN ASET (1xxxxx)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun Aset (1xxxxx) yang semestinya tidak terdapat di K/L tersebut, misal Persediaan Amunisi yang ada di Kementerian Kesehatan, atau persediaan Bansos di LIPI, atau <i>Piutang BLU layanan Kesehatan di Kemanristek Dikti</i>		✓	Tidak
2. Adakah Akun 1111xx hingga 1115xx? (<i>Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya adalah akun BUN</i>)		✓	Tidak
Akun Dibayar dimuka (prepaid) dan Uang Muka Belanja Khusus BUN (Transaksi Hibah, Bunga, Subsidi, Lain-lain, dan Transfer merupakan Transaksi BUN)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (<i>prepaid</i>)		✓	Tidak
2. Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		✓	Tidak

AKUN KEWAJIBAN (2xxxxx)		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		✓	Tidak
Telaah Akun Hibah Langsung Yang Belum Disahkan (akun 218211)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		✓	Ya/Tidak
2.	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada akhir tahun 2020? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan 2020)			Ya
3.	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?			Tidak
<p><i>Sehubungan terbitnya Surat S-876/PB/2020 ttg Penyelesaian Hibah Langsung Bentuk Uang/Barang/Jasa/ Surat Berharga Tahun Anggaran Yang Lalu, satker yang memiliki hibah langsung TAYL diwajibkan untuk mengesahkan pendapatan hibahnya sehingga saldo akun hibah langsung yang belum disahkan pada laporan keuangan Tahunan adalah Hibah Tahun Anggaran Berjalan yang belum disahkan.</i></p>				
4.	Jika ada akun 111827-Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan, apakah nilainya ≤ akun 218211 ?			Ya
AKUN EKUITAS (3xxxxx)		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 391117-Penyesuaian Nilai Persediaan		✓	Tidak
2.	Adakah akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kec. Di RRI, TVRI dan POLRI		✓	Tidak
3.	Adakah Saldo akun 391114-Revaluasi Aset Tetap		✓	Ya
4.	Adakah Saldo akun 391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya		✓	Ada/Tidak
5.	Jika ada, Apakah Saldo akun 391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya berasal dari transaksi reklasifikasi Aset Tetap /Aset Lainnya dengan masa manfaat yang berbeda dan/atau reklasifikasi persediaan menjadi aset ekstrakomptabel atau sebaliknya			Ya
6.	Apakah Saldo akun 391131-Pengesahan Hibah Langsung ≥ akun 111822-Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah			Ya
<p><i>saldo akun 391151 hanya berasal dari selisih akumulasi penyusutan aset yang dilakukan reklas keluar dan reklas masuk. Nilai aset yang direklas keluar dan direklas masuk semestinya sama. Selisih transaksi reklas keluar dan reklas masuk aset tetap/persediaan bisa ditelaah dan memuat penjelasan di Akhlak Satker</i></p>				
Akun 313221-Transfer Masuk (TM) dan akun 313211-Transfer Keluar (TK)				
1.	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada excel Monitoring TK/TM e-Rekon&LK			0
<p><i>Selisih secara absolut diperoleh dari e-rekon&LK (menu monitoring >> Transfer Masuk/Keluar), dengan mengurangkan kolom TK dengan kolom TM, kemudian hasilnya diabsolutkan (yang hasilnya negatif, dibuat positif). Apakah ada penjelasan secara manajemen penyebab selisih TKTM secara absolut tsb ?</i></p>				
2.	Nilai selisih TK/TM secara Neto/Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan			0
AKUN PENDAPATAN (4xxxxx)				
Akun Pendapatan Perpajakan (41xxxx)		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 41xxxx-Pendapatan Perpajakan kecuali BA.015.04 ?		✓	Tidak
Ketepatan penggunaan Akun PNBPN Baru (Kepdirjen 211/PB/2018 BAS)		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 423xxx		✓	Tidak
2.	Adakah akun 421xxx khusus BUN? Yaitu 421111, 421211, 421621		✓	Tidak
3.	Adakah akun 422xxx khusus BUN? Yaitu 4221xx		✓	Tidak
4.	Adakah akun 425xxx khusus BUN? Antara lain 425143, 425144, 425161, 425162, 425745, 425772, 425773, 425774, 425815, 425816, 425998		✓	Tidak

Akun Penerimaan Kembali Belanja Khusus BUN		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah Akun 425914/5/6/8/9 Penerimaan kembali belanja Kewajiban Utang/Subsidi/hibah/lain-lain/transfer TAYL		✓	Tidak
Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun yang tidak normal keberadaannya?, misalnya pendapatan SIM/STNK/Kejaksaaan terdapat pada Kementerian Kesehatan		✓	Tidak
2.	Adakah akun 425719-Pendapatan Bunga Lainnya Di KL? seharusnya 425764-Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)		✓	Tidak
Akun Pendapatan Hibah (43xxxx)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 43xxxx-Pendapatan Hibah		✓	Tidak
Telaah Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Apakah ada akun 491429-Pendapatan Perolehan Aset Lainnya?		✓	Ya/Tidak
2.	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?)			Ya/Tidak
AKUN BELANJA (5xxxxx)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 54/55/56/57xxxx (Beban Bunga, Subsidi, Hibah, lain-lain) ?		✓	Tidak
TELAH TERKAIT BLU		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan"		✓	Tidak
2.	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada Aplikasi e-rekon? (cek pada Aplikasi e-Rekon pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		✓	Tidak
Jika TIDAK Memiliki Satker BLU		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 424xxx-Pendapatan BLU		✓	Tidak
2.	Adakah akun 525xxx (Belanja Barang dan Jasa BLU)		✓	Tidak
3.	Adakah akun 527xxx (Belanja Modal BLU)		✓	Tidak
Telaah Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 491511			
2.	Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 593311			
3.	Isi kolom di sebelah kanan hasil dari akun 491511 dikurangi akun 593311			-
4.	Apakah nilai angka 1, 2, dan 3 diatas normal ? Tidak terlalu besar atau terlalu kecil?		✓	Tidak
<i>Untuk mengetahui apakah selisih tsb. Wajar, dapat dengan cara: membandingkan dengan tahun lalu, men-sort ascending per satker dan menelaah apakah normal (misalnya satker kecil namun nilainya lebih besar dari Satker Besar), atau membuat benchmark per Satker kecil/satker besar dan cara2 lainnya.</i>				
5.	Adakah akun 491511/593311 yang berasal dari transaksi Reklas Keluar (K10)/Reklas Masuk(M07)		✓	Tidak
<i>Jenis Transaksi K10-Reklas Keluar dan M07-Reklas Masuk seharusnya menghasilkan akun "391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya". Jika masih terdapat Jenis transaksi tersebut yang menghasilkan 491511/593311, satker tersebut belum melakukan update Aplikasi persediaan dan melakukan pengiriman ulang dari bulan januari. Untuk menelusuri dapat dilakukan dengan mencetak excel "Jurnal Umum Penyesuaian" di menu "daftar" di Aplikasi e-Rekon kemudian filter Jenis Transaksi K10/M07</i>				
6.	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19?	✓		Ya/Tidak
7.	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19?	✓		Ya

LAPORAN OPERASIONAL				
Pengecekan Pos/Akun yang tidak boleh ada		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah pendapatan Perpajakan (Kecuali BA.015)			Tidak
2.	Adakah pendapatan Hibah			Tidak
3.	Adakah beban bunga			Tidak
4.	Adakah beban subsidi			Tidak
5.	Adakah beban hibah			Tidak
6.	Adakah beban transfer			Tidak
7.	Adakah beban lain-lain			Tidak
Pengecekan saldo Normal		Ada	Tidak	Seharusnya
8.	Adakah akun "null" atau tidak ada uraiannya (<i>saldo akun "null" biasanya disebabkan karena belum dilakukan update aplikasi</i>)		✓	Tidak
9.	Apakah seluruh akun bernilai positif, kecuali Beban Penyisihan Piutang	✓		Ya
<i>Seluruh Akun LO Nilai Normalnya adalah Positif (baik pada Kegiatan Operasional, Non Operasional maupun Pos Luar Biasa), kecuali beban penyisihan piutang dapat bernilai negatif. (yang harus positif adalah akunnya, sedangkan penjumlahan/sub penjumlahan pada LO dapat bernilai Negatif).</i>				
Kebenaran Beban Penyisihan Piutang sesuai Perdirjen 43/2015		Ya	Tidak	Seharusnya
10.	Saldo Awal Penyisihan Piutang (<i>Jk.Pendek dan Jk.Panjang</i>) - Saldo Akhir Penyisihan Piutang (<i>Jk.Pendek dan Jk.Panjang</i>) = Beban Penyisihan Piutang LO	✓		Ya
<i>Jika hasil diatas "tidak", maka cek apakah ada penghapusan piutang dan/atau koreksi piutang senilai selisih diatas. Jika tidak ada, kemungkinan salah dalam menjurnal penyisihan piutang.</i>				
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Apakah ada saldo pos "Selisih Revaluasi Aset"		✓	Tidak
<i>Jika ada, telusuri saldo tersebut terdapat di satker mana melalui aplikasi e-rekon kemudian pastikan kebenaran dokumen sumbernya.</i>				
2.	Pada LPE, apakah "Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	✓		Sama
<i>Apabila perhitungan no.2 menghasilkan "tidak sama" berarti ada Satker melakukan jurnal menggunakan akun 391111</i>				
Pengecekan akun koreksi		Ya	Tidak	Seharusnya
Cek seluruh akun koreksi yaitu 391113, 391114, 391116, 391118 dan 391119				
1.	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud ?			Ya
Contoh 1 : Pengungkapan 391116 (Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi) senilai Rp 151.500.000 disebabkan oleh Transaksi Saldo Awal (100) senilai Rp100.000.000, Transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas (204) Rp 51.500.000 dengan dokumen sumber BAST.				
Contoh 2 : Pengungkapan akun 391119-Koreksi lainnya senilai Rp 23.500.000 disebabkan oleh adanya kesalahan pencatatan utang senilai Rp23.000.000 dan pencatatan piutang senilai 500.000 di tahun anggaran yang lalu sehingga dilakukan dikoreksi di tahun berjalan				
NERACA				
		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Apakah Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	✓		Ya
2.	Apakah ada Penjurnalan akun "Belum Diregister" yang dipasangkan dengan beban ?		✓	Tidak
<i>Pastikan tidak terdapat jurnal manual yang dilakukan oleh operator dalam rangka menghilangkan Akun belum diregister dengan memasangkannya dengan akun beban yang disebabkan karena kesalahan akun belanja. Jurnal tersebut dapat ditelusuri dengan mencetak excel "Jurnal Umum Penyesuaian" di menu "daftar" di Aplikasi e-Rekon kemudian memilih jenis jurnal "ALL" atau "JRNADJ" dan "JRNUMUM", kemudian filter kode akun register (D/K) dan Akun Beban (D/K)</i>				
3.	Dari kolom perbandingan antara 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019 adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar (terlalu tinggi/rendah) tanpa penjelasan?		✓	Tidak
4.	Normalnya total ASET akan naik dibanding Audited 2019, Apakah demikian?			Ya

TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN			
<i>Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya, bila jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya juga "TIDAK"</i>			
Pengecekan Saldo Kas di Bendahra Pengeluaran	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Saldo Kas di Bendahra Pengeluaran = LPJ Bendahra dan Aplikasi Silabi ?	✓		Ya
Pengecekan telah melakukan penyisihan piutang	Ada	Tidak	Seharusnya
2. Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun:		✓	Ada/Tidak
- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/Penyisihan TP/TGR (Neraca)	✓		Ada
- Beban Penyisihan Piutang (di LO)	✓		Ada
Pengecekan telah melakukan reklasifikasi piutang jk. Panjang	Ada	Tidak	Seharusnya
3. Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun:		✓	Ada/Tidak
- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang			Ada
Pengecekan persediaan	Ada	Tidak	Seharusnya
4. Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Beban Persediaan (di LO)			Ada
- 491511-Pendapatan Penyesuaian Persediaan di Neraca Percobaan			Ada/Tidak
- 593311-Beban Penyesuaian Persediaan di Neraca Percobaan			Ada/Tidak
Pengecekan penyusutan aset tetap	Ada	Tidak	Seharusnya
5. Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Akumulasi AT/AL (Neraca)	✓		Ada
- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	✓		Ada
<i>Mulai tahun 2018 dengan e-Rekon&LK G2 dimungkinkan ada Satker yang lupa melakukan penyusutan/amortisasi Semester II</i>			
Pengecekan Beban Diserahkan ke Masyarakat & Beban Bansos	Ada	Tidak	Seharusnya
6. Adakah beban barang diserahkan ke Masyarakat?		✓	Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 526xxx pada neraca percobaan kas ?			Ya
7. Adakah beban bansos?			Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 57xxxx pada neraca percobaan kas ?		✓	Ya
Pengecekan Jurnal Akrual	Ada	Tidak	Seharusnya
8. Adakah realisasi pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492x)?			Ada/Tidak
- Adakah akun 219211-Pendapatan sewa diterima Dimuka pada Neraca ?			Ada/Tidak
9. Adakah realisasi 522141-Belanja Sewa di Neraca Percobaan Kas () ?		✓	Ada/Tidak
- Adakah belanja Barang dibayar dimuka pada Neraca	✓		Ada/Tidak
10. Adakah realisasi belanja Jasa Listrik/telepon/air di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9) ?			Ada/Tidak
- Ada Belanja Barang yang masih harus dibayar pada Neraca	✓		Ada
KESESUAIAN DENGAN L-BMN			
Rekon Internal LKKL dengan L-BMN	Ya/Ada	Tidak	Seharusnya
1. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Sawal di e-Rekon&LK?		✓	Tidak
2. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Bulan Desember 2020 di e-Rekon&LK?		✓	Tidak
<i>Pada e-Rekon&LK G2 lihat menu "Monitoring BMN>> Rekap Rekon Internal dan Rekap Rekon Internal Sawal"</i>			
3. Apakah menurut e-Rekon-lk terdapat Jurnal Tidak lazim (menu Daftar >> Jurnal Tidak Lazim) yaitu jurnal dengan akun Persediaan/Aset yang seharusnya hanya kiriman dari Aplikasi SIMAK ?		✓	Tidak
4. Jika ada, apakah jurnal tersebut telah benar?			Ya

Validasi Transaksi BMN Pada Aplikasi e-Rekon	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Apakah terdapat transaksi BMN yang terkena validasi pada Aplikasi e-Rekon&LK yang meliputi , Nilai Perolehan Minus, Nilai Buku Minus dll. (Masuk ke Aplikasi e-Rekon&LK, kemudian pilih "daftar BMN")			
MENU DAFTAR BMN			
	Seharusnya	Ya	Tidak
1 Adakah Nilai Perolehan Minus (Intrakomptabel)?	Tidak		
2 Berapa NUP BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi jumlah NUP)			
3 Berapa Total Nilai BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi nilai rupiahnya)			
4 Adakah Nilai Buku Minus (Intrakomptabel)?	Tidak		
5 Berapa NUP BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi jumlah NUP)			
6 Berapa Total Nilai BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi nilai rupiahnya)			
LAPORAN REALISASI ANGGARAN			
	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Pagu Minus? (Cek melalui e-Rekon-lk menu daftar >> pagu minus")		✓	Tidak
2. Adakah uraian jenis belanja "tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas?		✓	Tidak
Pengecekan TDK			
1. Adakah TDK Belanja Netto baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		✓	Tidak
2. Adakah TDK Pendapatan Netto di Satker Aktif, Tidak Aktif dan tidak aktif bersaldo ?		✓	Tidak
3. Adakah TDK Pendapatan MPHL-BJS		✓	Tidak
4. Adakah TDK Kas di Bendahara BLU baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		✓	Tidak
5. Adakah TDK Kas di Bendahara Pengeluaran baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		✓	Tidak
6. Adakah TDK Kas Hibah baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		✓	Tidak
<i>e-Rekon&LK Menu Monitoring >> Transaksi Dalam Konfirmasi" atas seluruh jenis TDK baik pada Satker DIPA Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo</i>			
SATKONS dan PENGAWASAN TEMUAN BPK TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA			
Telaah ini bertujuan meminimalisir adanya temuan tahun lalu yang belum diselesaikan dan terjadinya temuan yang berulang. Dibawah ini adalah contoh-contoh telaahnya.			
Satker Konsolidasian	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Jurnal tahun 2019 telah diselesaikan (Dinihilkan) ?			
2. Apakah telah dilakukan Jurnal Take-In Reval dengan benar ?			
<i>Cek kebenaran apabila ada Jurnal baru di Tahun 2020</i>			
Pertanyaan berdasarkan temuan-temuan BPK tahun-tahun lalu (Disesuaikan dengan kondisi masing-masing satker)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah sudah dibuat Berita Acara Stock Opname Persediaan ?			Ya
2. Apakah semua jurnal manual di SAIBA telah dibuatkan Memo Penyesuaian beserta dokumen pendukung terkait?			Ya
3. Masih adakah kesalahan akun belanja Persediaan			Tidak
4. Apakah PNPB telah disetor tepat pada waktunya (tidak terlambat)			Ya
5. Adakan PNPB digunakan langsung?			Tidak
6. Apakah seluruh pendapatan dan Belanja BLU telah disahkan (di-SP3B-BLUkan)?			Ya
7. Apakah seluruh hibah langsung telah disahkan (di-SP2HL-kan)?			Ya
8.			Ya

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kesesuaian antara Face Laporan dan CaLK	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Rincian yang ada di CaLK sama dengan LKML (Neraca Percobaan)	✓		Sama
<i>Masih sering ditemukan kesalahan ketik nilai2 yang seharusnya dituliskan di CaLK.</i>			
Kecukupan pengungkapan pada CaLK (Bila akun tsb ada)	Ya/Ada	Tidak	Seharusnya
2. Apakah pengungkapan Revaluasi BMN telah sesuai baik pada Penjelasan Umum, LO, LPE dan Neraca ?	✓		Ya
3. Apakah pengungkapan dan ikhtisar Transaksi yang bersumber dari PHLN telah secara memadai sesuai format ?	✓		Ya
4. Apakah pengungkapan KDP telah sesuai?	✓		Ya
5. Apakah ada penjelasan akun "Dana Yang Dibatasi Penggunaannya" ?	,	✓	Ada
<i>Akun Kas dan Akun lainnya yang substansinya merupakan Kas adalah akun yang "sensitif", pastikan kebenaran seluruh akun tsb., bila perlu bandingkan dengan LPJ Bendahara dan Rekening Koran.</i>			
7. Apakah terdapat penjelasan akun Hibah Langsung yang Belum Disahkan ?			Ya
8. Apakah format dan penjelasan akun-akun LPE telah sesuai? Terutama penjelasan akun Koreksi?			Ya
9. Apakah belanja dalam rangkai penanganan Pandemi Covid-19 telah dijelaskan dalam CaLK?			Ya
ANALISIS LAINNYA			
Analisis Laporan Keuangan Lainnya	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Realisasi Belanja 51 + 525111 = Beban Pegawai pada Laporan Operasional	✓		Ya
2. Apakah realisasi belanja 53 = (Pembelian Aset Tetap+Perolehan KDP+Pengembangan KDP)- Hibah Langsung Barang	✓		Ya
3. Apakah Beban Penyusutan/Amortisasi = Akumulasi Penyusutan/Amortisasi 2020 - Saldo Awal Penyusutan/Amortisasi 2020	✓		Ya
4. Apakah Beban Persediaan = Saldo Awal + Pembelian - Saldo Akhir (<i>rumus perhitungan beban persediaan terlampir</i>)	✓		Ya
Pengungkapan Dampak dan Penanganan Pandemi COVID-19			
Kecukupan pengungkapan pada CaLK - LRA	Ada	Tidak	
1. Apakah terdapat pengungkapan atas <i>Refocussing</i> kegiatan/Realokasi anggaran/Revisi DIPA terkait penanganan Pandemi Covid-19			
2. Jika terdapat <i>Refocussing</i> kegiatan/Realokasi anggaran/Revisi DIPA terkait penanganan Pandemi Covid-19, berapa nominal perubahannya (kenaikan/penurunan) pada total anggaran K/L	Rp		
3. Apakah terdapat pengungkapan atas perubahan Estimasi Pendapatan (Pajak dan/atau PNBPNBP) sebagai dampak Pandemi Covid-19			
4. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Pendapatan (Pajak dan/atau PNBPNBP) khususnya sebagai dampak Pandemi Covid-19			
5. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Belanja dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun Non penanganan pandemi Covid-19			
6. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Belanja dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun penanganan pandemi Covid-19			
Kecukupan pengungkapan pada CaLK - Laporan Operasional	Ada	Tidak	
7. Apakah terdapat pengungkapan atas perubahan Realisasi Pendapatan - LO (Pajak dan/atau PNBPNBP) sebagai dampak Pandemi Covid-19			
8. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Beban dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun Non penanganan pandemi Covid-19			
9. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Beban dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun penanganan pandemi Covid-19			
Kecukupan pengungkapan pada CaLK - Laporan Perubahan Ekuitas	Ada	Tidak	
10. Apakah terdapat pengungkapan atas Transaksi Antar Entitas berupa Transfer Masuk – Transfer Keluar, dapat berupa pengiriman barang persediaan, peralatan dan mesin berupa alat kesehatan, dan/atau jenis-jenis BMN lainnya yang spesifik untuk penanganan pandemi COVID-19.			

11. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi pengesahan hibah langsung baik berupa uang, barang, maupun jasa yang diterima oleh K/L dalam rangka penanganan pandemi COVID-19		
Kecukupan pengungkapan pada CaLK - Neraca	Ada	Tidak
12. Apakah terdapat pengungkapan atas Pos Aset, antara lain :		
a. Kenaikan/penurunan Piutang sebagai dampak pandemi Covid-19		
b. Kenaikan/penurunan Persediaan sebagai dampak pandemi Covid-19		
c. Kenaikan/penurunan KDP sebagai dampak pandemi Covid-19		
d. Kenaikan/penurunan pos aset yang lain, sebutkan		
13. Apakah terdapat pengungkapan atas Pos Kewajiban, antara lain :		
a. Kenaikan/penurunan Utang kepada pihak ketiga sebagai dampak pandemi Covid-19		
b. Kenaikan/penurunan Hibah yang belum disahkan sebagai dampak pandemi Covid-19		

Analisis Laporan Keuangan Lainnya dimungkinkan menghasilkan perhitungan yang tidak sama dengan rumus. Namun perlu dianalisis penyebab selisihnya. Analisis dapat dilakukan dengan bantuan ayat Jurnal Penyesuaian (excel) yang tersedia pada Aplikasi e-Rekon&LK.

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan e-Rekon&LK"

Mengetahui

Pejabat Penyusun LKKL,



(Muhammad Iman Septian S.Ip

NIP.19850921 201101 1 011

Pangkalan Balai, 04 Januari 2021

Penelaah,



(Endang Efendi S.E., M.M

NIP.19840913 200904 1 002

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 TINGKAT SATUAN KERJA**
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 WILAYAH/PROPINSI : 1100 SUMATERA SELATAN
 SATUAN KERJA : 401909 SATKER INI BELUM DIREKAM

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019	Jumlah	%
1	2	3	4	5
EKUITAS AWAL	2,103,799,581	0	2,103,799,581	0.00
SURPLUS/DEFISIT - LO	(4,400,835,035)	(3,228,987,833)	(1,171,847,202)	36.29
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0	(25,742,498)	25,742,498	(100.00)
Penyesuaian Nilai Aset	0	0	0	0.00
Koreksi Nilai Persediaan	0	0	0	0.00
Koreksi Atas Reklasifikasi	0	(22,771,650)	22,771,650	(100.00)
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0	0	0	0.00
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	0	0	0	0.00
Koreksi Lain-lain	0	(2,970,848)	2,970,848	(100.00)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	11,234,314,725	5,358,529,912	5,875,784,813	109.65
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	6,833,479,690	2,103,799,581	4,729,680,109	224.81
EKUITAS AKHIR	8,937,279,271	2,103,799,581	6,833,479,690	324.81

Pangkalan Batai, 31 Desember 2020

Sekretaris

Endang Efendi S.E., M.M.

NIP. 19840913 200904 1 002



LAPORAN KINERJA SATKER
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020
 (dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
 ESELON I : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 WILAYAH/PROVINSI : 1100 SUMATERA SELATAN
 SATUAN KERJA : 401909 SATKER INI BELUM DIREKAM
 JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH

Kode Lap. : lap_out
 Tanggal : Tuesday, March 30,
 Halaman : 1
 Prog.Id : lu_capatout

KODE	URAIAN	BELANJA			KELUARAN				KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	%	RENCANA	REALISASI VOLUME	SATUAN	PROGRESS %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN								
04	PERADILAN								
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung								
1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	4.352.735.000	4.165.838.847	95.71		1.00	Layanan	95.71	
994	Layanan Perkantoran	4.352.735.000	4.165.838.847	95.71					
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 1066	4.352.735.000	4.165.838.847	95.71					
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 03.04.01	4.352.735.000	4.165.838.847	95.71					
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung								
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	5.410.504.000	5.354.077.115	98.96				98.96	
951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	5.410.504.000	5.354.077.115	98.96	1	1.00	Layanan	98.96	
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 1071	5.410.504.000	5.354.077.115	98.96					
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 03.04.02	5.410.504.000	5.354.077.115	98.96					
	JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 03.04	9.763.239.000	9.519.915.962	97.51					
	JUMLAH BELANJA FUNGSI 03	9.763.239.000	9.519.915.962	97.51					
	JUMLAH BELANJA JENIS SATKER KD	9.763.239.000	9.519.915.962	97.51					
	JUMLAH BELANJA	9.763.239.000	9.519.915.962	97.51					

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 TINGKAT SATUAN KERJA**
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 WILAYAH/PROPINSI : 1100 SUMATERA SELATAN
 SATUAN KERJA : 401909 SATKER INI BELUM DIREKAM

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019	Jumlah	%
1	2	3	4	5
EKUITAS AWAL	2,103,799,581	0	2,103,799,581	0.00
SURPLUS/DEFISIT - LO	(4,400,835,035)	(3,228,987,833)	(1,171,847,202)	36.29
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0	(25,742,498)	25,742,498	(100.00)
Penyesuaian Nilai Aset	0	0	0	0.00
391117 Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0	0.00
Koreksi Nilai Persediaan	0	0	0	0.00
391113 Koreksi Nilai Persediaan	0	0	0	0.00
Koreksi Atas Reklasifikasi	0	(22,771,650)	22,771,650	(100.00)
391151 Koreksi Atas Reklasifikasi Persediaan/Aset	0	(22,771,650)	22,771,650	(100.00)
Tetap/Aset Lainnya				
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0	0	0	0.00
391114 Revaluasi Aset Tetap	0	0	0	0.00
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	0	0	0.00
391116 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	0	0	0.00
391118 Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	0	0	0	0.00
Koreksi Lain-lain	0	(2,970,848)	2,970,848	(100.00)
391119 Koreksi Lainnya	0	(2,970,848)	2,970,848	(100.00)
391121 Ekuitas Transaksi Lainnya	0	0	0	0.00
311312 Pengembalian Pendapatan BLU Tahun	0	0	0	0.00
Anggaran Yang Lalu				
311313 SAL Selisih Kurs Belum Terealisasi	0	0	0	0.00
311315 Penyesuaian SAL BLU	0	0	0	0.00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	11,234,314,725	5,358,529,912	5,875,784,813	109.65
313111 Ditagihkan Ke Entitas Lain	9,519,175,725	3,488,750,055	6,030,425,670	172.85
313121 Diterima Dari Entitas Lain	0	(7,926,680)	7,926,680	(100.00)
313211 Transfer Keluar	0	0	0	0.00
313221 Transfer Masuk	1,715,139,000	1,877,706,537	(162,567,537)	(8.65)
313231 Transaksi Pengelolaan Investasi BA BUN pada BLU	0	0	0	0.00
391131 Pengesahan Hibah Langsung	0	0	0	0.00
391132 Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	0	0	0	0.00
391133 Pengesahan Hibah Langsung TAYL	0	0	0	0.00
391141 Setoran Surplus BLU	0	0	0	0.00
391142 Transfer keluar Kas BLU kepada BLU lain	0	0	0	0.00
391143 Transfer masuk Kas BLU dari BLU lain	0	0	0	0.00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	6,833,479,690	2,103,799,581	4,729,680,109	224.81
EKUITAS AKHIR	8,937,279,271	2,103,799,581	6,833,479,690	324.81

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA**
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROPINSI : 1100 SUMATERA SELATAN
SATUAN KERJA : 401909 SATKER INI BELUM DIREKAM

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019	Jumlah	%
1	2	3	4	5

Pangkalan Balai, 31 Desember 2020
Sekretaris

Endang Efendi S.S., M.M.
NIP. 19840913 200904 1 002



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2020
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROPINSI : 1100 SUMATERA SELATAN
SATUAN KERJA : 401909 SATKER INI BELUM DIREKAM
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH

Kode Lap. : LRBST 01
Tanggal : Tuesday, March 30,
Halaman : 1
Prog.id : lu_lrabstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TAHUN INI	JUMLAH S/D TAHUN INI	PENGEMBALIAN S/D TAHUN INI	JUMLAH NETO S/D TAHUN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	TRANSAKSI KAS								
0	RUPIAH MURNI								
03	RM								
04	KETERTIBAN DAN KEAMANAN PERADILAN								
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung								
1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi								
994	Layanan Perkantoran								
51	BELANJA PEGAWAI								
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS								
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	898,529,000	1,414,541,000	1,414,536,560	1,414,536,560	0	1,414,536,560	100.00	4,440
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	24,000	27,000	26,349	26,349	(140)	26,209	97.07	791
511121	Belanja Tunj. Suamistri PNS	83,947,000	98,520,000	98,519,124	98,519,124	0	98,519,124	100.00	876
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	26,949,000	28,079,000	28,078,020	28,078,020	0	28,078,020	100.00	980
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	28,140,000	28,141,000	28,140,000	28,140,000	0	28,140,000	100.00	1,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	917,980,000	1,233,081,000	1,232,990,000	1,232,990,000	0	1,232,990,000	99.99	91,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	142,575,000	142,575,000	115,294,490	115,294,490	0	115,294,490	80.87	27,280,510
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	78,141,000	78,141,000	72,420,000	72,420,000	0	72,420,000	92.68	5,721,000
511129	Belanja Uang Makan PNS	351,648,000	351,648,000	273,644,000	273,644,000	0	273,644,000	77.82	78,004,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	76,300,000	76,300,000	25,135,000	25,135,000	(740,097)	24,394,903	31.97	51,905,097
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	2,604,233,000	3,451,053,000	3,288,783,543	3,288,783,543	(740,237)	3,288,043,306	95.30	163,009,694

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2020
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
 ESELON I : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 WILAYAH/PROVINSI : 1100 SUMATERA SELATAN
 SATUAN KERJA : 401909 SATKER INI BELUM DIREKAM
 JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH

Kode Lap. : LRBST 01
 Tanggal : Tuesday, March 30,
 Halaman : 2
 Prog.Id : lu_lrabstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TAHUN INI	JUMLAH SID TAHUN INI	PENGEMBALIAN SID TAHUN INI	JUMLAH NETO SID TAHUN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	2.604.233,000	3.451.053,000	3.288.783,543	3.288.783,543	(740.237)	3.288,043,306	95.30	163,009,694
52	BELANJA BARANG								
5211	Belanja Barang Operasional	402.320,000	401,520,000	401,304,303	401,304,303	0	401,304,303	99.95	215,697
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	12,000,000	3,840,000	3,484,000	3,484,000	0	3,484,000	90.99	346,000
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	39,600,000	39,600,000	39,600,000	39,600,000	0	39,600,000	100.00	0
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	30,150,000	30,150,000	28,425,000	28,425,000	0	28,425,000	94.28	1,725,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	0	36,312,000	25,932,000	25,932,000	0	25,932,000	71.41	10,380,000
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	484,070,000	511,422,000	498,755,303	498,755,303	0	498,755,303	97.52	12,666,697
5218	Belanja Barang Persediaan								
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	33,810,000	33,810,000	33,767,000	33,767,000	0	33,767,000	99.87	43,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	33,810,000	33,810,000	33,767,000	33,767,000	0	33,767,000	99.87	43,000
5221	Belanja Jasa								
522111	Belanja Langganan Listrik	60,000,000	27,600,000	25,609,884	25,609,884	0	25,609,884	92.79	1,990,116
522112	Belanja Langganan Telepon	9,000,000	10,590,000	10,153,582	10,153,582	0	10,153,582	95.86	436,418
522113	Belanja Langganan Air	6,000,000	7,200,000	6,630,000	6,630,000	0	6,630,000	92.08	570,000
522141	Belanja Sewa	50,400,000	85,680,000	85,680,000	85,680,000	0	85,680,000	100.00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	125,400,000	131,070,000	128,073,466	128,073,466	0	128,073,466	97.71	2,996,534
5231	Belanja Pemeliharaan								
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	119,250,000	146,280,000	146,203,970	146,203,970	0	146,203,970	99.95	76,030
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	34,400,000	34,700,000	28,484,701	28,484,701	0	28,484,701	82.09	6,215,299
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	153,650,000	180,980,000	174,688,671	174,688,671	0	174,688,671	96.52	6,291,329

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2020
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROPINSI : 1100 SUMATERA SELATAN
SATUAN KERJA : 401909 SATKER INI BELUM DIREKAM
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH

Kode Lap. : LRBST 01
Tanggal : Tuesday, March 30,
Halaman : 3
Prog.Id : lu_lrabstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA					% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TAHUN INI	JUMLAH SID TAHUN INI	PENGEMBALIAN SID TAHUN INI	JUMLAH NETO SID TAHUN INI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri									
524111	Belanja Perjalanan Biasa	58,160,000	44,400,000	41,770,864	41,770,864	0	41,770,864	94.08	2,629,136	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	11,312,000	0	0	0	0	0	0.00	0	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	69,472,000	44,400,000	41,770,864	41,770,864	0	41,770,864	94.08	2,629,136	
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	866,402,000	901,682,000	877,055,304	877,055,304	0	877,055,304	97.27	24,626,696	
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 1066.984	3,470,635,000	4,352,735,000	4,165,838,847	4,165,838,847	(740,237)	4,165,098,610	95.71	187,636,390	
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 1066	3,470,635,000	4,352,735,000	4,165,838,847	4,165,838,847	(740,237)	4,165,098,610	95.71	187,636,390	
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 03.04.01	3,470,635,000	4,352,735,000	4,165,838,847	4,165,838,847	(740,237)	4,165,098,610	95.71	187,636,390	
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung									
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung									
951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal									
53	BELANJA MODAL									
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin									
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100,000,000	100,000,000	98,400,000	98,400,000	0	98,400,000	98.40	1,600,000	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	100,000,000	100,000,000	98,400,000	98,400,000	0	98,400,000	98.40	1,600,000	
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan									
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	23,730,249,000	5,310,504,000	5,255,677,115	5,255,677,115	0	5,255,677,115	98.97	54,826,885	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	23,730,249,000	5,310,504,000	5,255,677,115	5,255,677,115	0	5,255,677,115	98.97	54,826,885	
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	23,830,249,000	5,410,504,000	5,354,077,115	5,354,077,115	0	5,354,077,115	98.96	56,426,885	
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 1071.951	23,830,249,000	5,410,504,000	5,354,077,115	5,354,077,115	0	5,354,077,115	98.96	56,426,885	
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 1071	23,830,249,000	5,410,504,000	5,354,077,115	5,354,077,115	0	5,354,077,115	98.96	56,426,885	

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2020
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : 1100 SUMATERA SELATAN
SATUAN KERJA : 401909 SATKER INI BELUM DIREKAM
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH

Kode Lap. : LRBST 01
Tanggal : Tuesday, March 30,
Halaman : 4
Prog.id : lu_lrbstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA					% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TAHUN INI	JUMLAH SD TAHUN INI	PENGEMBALIAN S/D TAHUN INI	JUMLAH NETO S/D TAHUN INI	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 03.04.02	23,830,249,000	5,410,504,000	5,354,077,115	5,354,077,115	0	5,354,077,115	98.96	56,426,885	
	JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 03.04	27,300,884,000	9,763,239,000	9,519,915,962	9,519,915,962	(740,237)	9,519,175,725	97.51	244,063,275	
	JUMLAH BELANJA FUNGSI 03	27,300,884,000	9,763,239,000	9,519,915,962	9,519,915,962	(740,237)	9,519,175,725	97.51	244,063,275	
	JUMLAH BELANJA CARA PENARIKAN 0	27,300,884,000	9,763,239,000	9,519,915,962	9,519,915,962	(740,237)	9,519,175,725	97.51	244,063,275	
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 01	27,300,884,000	9,763,239,000	9,519,915,962	9,519,915,962	(740,237)	9,519,175,725	97.51	244,063,275	
	JUMLAH BELANJA JENIS SATKER KD	27,300,884,000	9,763,239,000	9,519,915,962	9,519,915,962	(740,237)	9,519,175,725	97.51	244,063,275	
	JUMLAH TRANSAKSI KAS	27,300,884,000	9,763,239,000	9,519,915,962	9,519,915,962	(740,237)	9,519,175,725	97.51	244,063,275	
	JUMLAH BELANJA (TRANSAKSI KAS DAN TRANSAKSI NON KAS	27,300,884,000	9,763,239,000	9,519,915,962	9,519,915,962	(740,237)	9,519,175,725	97.51	244,063,275	

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
 ESELON I : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 WILAYAH/PROPINSI : 1100 SUMATERA SELATAN
 SATUAN KERJA : 401909 SATKER INI BELUM DIREKAM
 JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

Kode Lap : LRAST
 Tanggal : Tuesday, March 30,
 Halaman : 1
 Prog Id : 101010101

No	URAIAN	2020				2019			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH								
A.1.1	PENERIMAAN NEGARA	0	0	0	0.00	0	7,926,680	7,926,680	0.00
A.1.1.a	Penerimaan Perpajakan	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
A.1.1.b	Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	0	0	0.00	0	7,926,680	7,926,680	0.00
A.1.2	HIBAH	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	0	0	0	0.00	0	7,926,680	7,926,680	0.00
B	BELANJA NEGARA								
B.1.1	Rupiah Murni	9,763,239,000	9,519,175,725	(244,063,275)	97.50	3,528,721,000	3,488,750,055	(39,970,945)	98.87
B.1.1.a	Belanja Pegawai	3,451,053,000	3,288,043,306	(163,009,694)	95.28	2,588,611,000	2,587,706,878	(904,122)	99.97
B.1.1.b	Belanja Barang	901,682,000	877,055,304	(24,626,696)	97.27	516,610,000	479,686,677	(36,923,323)	92.85
B.1.1.c	Belanja Modal	5,410,504,000	5,354,077,115	(56,426,885)	98.96	423,500,000	421,356,500	(2,143,500)	99.49
B.1.1.d	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.1.e	Subsidi	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.1.f	Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.1.g	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.1.h	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2	Pinjaman dan Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.a	Belanja Pegawai	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.b	Belanja Barang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.c	Belanja Modal	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.d	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.e	Subsidi	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.f	Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.g	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.h	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	JUMLAH BELANJA	9,763,239,000	9,519,175,725	(244,063,275)	97.50	3,528,721,000	3,488,750,055	(39,970,945)	98.87
C	PEMBIAYAAN								
C.1	PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.1.1	Perbankan Dalam Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
 ESELON I : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 WILAYAH/PROVINSI : 1100 SUMATERA SELATAN
 SATUAN KERJA : 401909 SATKER INI BELUM DIREKAM
 JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

Kode Lap : LRABT
 Tanggal : Tuesday, March 30,
 Halaman : 2
 Proglol : 00_prowk

No	URAIAN	2020				2019			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C.I.2	Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.II	PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.II.1	Penarikan Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.II.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00

Pangkalan Balai, 31 Desember 2020
 Sekretaris



Endang Cahyadi S.E., M.M.
 NIP. 19840913 200904 1 002

**LAPORAN OPERASIONAL
 TINGKAT SATUAN KERJA**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 WILAYAH/PROPINSI : 1100 SUMATERA SELATAN
 SATUAN KERJA : 401909 SATKER INI BELUM DIREKAM

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2020	2019	Jumlah	%
1	2	3	4	5
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN PERPAJAKAN				
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	0.00
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	0.00
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	0.00
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	0.00
Pendapatan Cukai	0	0	0	0.00
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	0.00
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	0.00
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	0.00
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0.00
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK				
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0.00
Pendapatan Dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	0	0	0	0.00
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	251,680	(251,680)	(100.00)
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	251,680	(251,680)	(100.00)
PENDAPATAN HIBAH				
Pendapatan Hibah	0	0	0	0.00
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	0.00
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	0	251,680	(251,680)	(100.00)
BEBAN OPERASIONAL				
Beban Pegawai	3,306,711,306	2,587,706,878	719,004,428	27.78
Beban Persediaan	18,178,000	16,973,000	1,205,000	7.09
Beban Barang dan Jasa	627,563,637	346,427,832	281,135,805	81.15
Beban Pemeliharaan	175,480,671	94,588,033	80,892,638	85.52
Beban Perjalanan Dinas	41,770,864	21,660,000	20,110,864	92.84
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	0.00
Beban Bunga	0	0	0	0.00
Beban Subsidi	0	0	0	0.00
Beban Hibah	0	0	0	0.00
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	231,571,557	169,543,770	62,027,787	36.58
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	0.00
Beban Transfer	0	0	0	0.00
Beban Lain-Lain	0	0	0	0.00

**LAPORAN OPERASIONAL
 TINGKAT SATUAN KERJA**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 WILAYAH/PROPINSI : 1100 SUMATERA SELATAN
 SATUAN KERJA : 401909 SATKER INI BELUM DIREKAM
 :
 JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2020	2019	Jumlah	%
1	2	3	4	5
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	4,401,276,035	3,236,899,513	1,164,376,522	35.97
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(4,401,276,035)	(3,236,647,833)	(1,164,628,202)	(35.98)
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR				
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0.00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0.00
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0.00
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0.00
Jumlah Surplus/(defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0.00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA				
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	603,000	7,675,000	(7,072,000)	(92.14)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	162,000	15,000	147,000	980.00
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	441,000	7,660,000	(7,219,000)	(94.24)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	441,000	7,660,000	(7,219,000)	(94.24)
POS LUAR BIASA				
Beban Luar Biasa	0	0	0	0.00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA	0	0	0	0.00
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(4,400,835,035)	(3,228,987,833)	(1,171,847,202)	(36.29)

Pang. Jalan Balai, 31 Desember 2020
 Sekretaris

Endang Efendi S.E., M.M
 N.P. 19840913 200904 1 002

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(DALAM RUPIAH)

Kode Laporan: NSAIE1T
 Tanggal : 30/03/21
 Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 WILAYAH/PROPINSI : 1100 SUMATERA SELATAN
 SATUAN KERJA : 401909 SATKER INI BELUM DIREKAM

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2020	2019	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	21,848,000	(21,848,000)	(100.00)
Persediaan	15,238,000	0	15,238,000	0.00
JUMLAH ASET LANCAR	15,238,000	21,848,000	(6,610,000)	(30.25)
ASET TETAP				
Tanah	2,819,580,000	1,104,441,000	1,715,139,000	155.29
Peralatan dan Mesin	958,157,620	859,757,620	98,400,000	11.44
Gedung dan Bangunan	383,657,000	383,657,000	0	0.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5,255,677,115	0	5,255,677,115	0.00
Akumulasi Penyusutan	(472,679,560)	(241,108,003)	(231,571,557)	96.04
JUMLAH ASET TETAP	8,944,392,175	2,106,747,617	6,837,644,558	324.55
JUMLAH ASET	8,959,630,175	2,128,595,617	6,831,034,558	320.91
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	22,350,904	2,948,036	19,402,868	658.16
Uang Muka dari KPPN	0	21,848,000	(21,848,000)	(100.00)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	22,350,904	24,796,036	(2,445,132)	(9.86)
JUMLAH KEWAJIBAN	22,350,904	24,796,036	(2,445,132)	(9.86)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	8,937,279,271	2,103,799,581	6,833,479,690	324.81
JUMLAH EKUITAS	8,937,279,271	2,103,799,581	6,833,479,690	324.81
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	8,959,630,175	2,128,595,617	6,831,034,558	320.91

Pangkalan Balai, 31 Desember 2020

Sekretaris

Endang Efendi, S.E., M.M

NIP. 19640913200904 1 002

**LAPORAN OPERASIONAL
 TINGKAT SATUAN KERJA**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 WILAYAH/PROPINSI : 1100 SUMATERA SELATAN
 SATUAN KERJA : 401909 SATKER INI BELUM DIREKAM

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2020	2019	Jumlah	%
1	2	3	4	5
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN PERPAJAKAN				
Pendapatan Pajak Penghasilan				
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah				
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan				
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan				
Pendapatan Cukai				
Pendapatan Pajak Lainnya				
Pendapatan Bea Masuk				
Pendapatan Bea Keluar				
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0.00
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK				
Pendapatan Sumber Daya Alam				
Pendapatan Dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)				
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya				
425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	251,680	(251,680)	(100.00)
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	251,680	(251,680)	(100.00)
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	251,680	(251,680)	(100.00)
PENDAPATAN HIBAH				
Pendapatan Hibah				
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	0.00
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	0	251,680	(251,680)	(100.00)
BEBAN OPERASIONAL				
Beban Pegawai				
511111 Beban Gaji Pokok PNS	1,414,536,560	1,251,121,242	163,415,318	13.06
511119 Beban Pembulatan Gaji PNS	26,209	15,783	10,426	66.05
511121 Beban Tunj. Suami/Istri PNS	98,519,124	74,947,580	23,571,544	31.45
511122 Beban Tunj. Anak PNS	28,078,020	23,513,108	4,564,912	19.41
511123 Beban Tunj. Struktural PNS	28,140,000	27,365,000	775,000	2.83
511124 Beban Tunj. Fungsional PNS	1,232,990,000	793,720,000	439,270,000	55.34
511125 Beban Tunj. PPh PNS	115,294,490	84,941,545	30,352,945	35.73
511126 Beban Tunj. Beras PNS	72,420,000	59,818,920	12,601,080	21.06
511129 Beban Uang Makan PNS	292,312,000	234,393,700	57,918,300	24.70
511151 Beban Tunjangan Umum PNS	24,394,903	37,870,000	(13,475,097)	(35.58)
Jumlah Beban Pegawai	3,306,711,306	2,587,706,878	719,004,428	27.78
Beban Persediaan				

**LAPORAN OPERASIONAL
 TINGKAT SATUAN KERJA**
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 WILAYAH/PROPINSI : 1100 SUMATERA SELATAN
 SATUAN KERJA : 401909 SATKER INI BELUM DIREKAM

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2020	2019	Jumlah	%
1	2	3	4	5
593111 Beban Persediaan konsumsi	18,178,000	16,973,000	1,205,000	7.09
Jumlah Beban Persediaan	18,178,000	16,973,000	1,205,000	7.09
Beban Barang dan Jasa				
521111 Beban Keperluan Perkantoran	401,304,303	212,273,560	189,030,743	89.05
521114 Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3,494,000	2,879,000	615,000	21.36
521115 Beban Honor Operasional Satuan Kerja	39,600,000	48,960,000	(9,360,000)	(19.11)
521119 Beban Barang Operasional Lainnya	28,425,000	1,256,000	27,169,000	2,163.13
521131 Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	25,932,000	0	25,932,000	0.00
522111 Beban Langganan Listrik	25,604,960	22,302,564	3,302,396	14.80
522112 Beban Langganan Telepon	10,148,374	6,756,708	3,391,666	50.19
522113 Beban Langganan Air	7,375,000	6,000,000	1,375,000	22.91
522141 Beban Sewa	85,680,000	46,000,000	39,680,000	86.26
Jumlah Beban Barang dan Jasa	627,563,637	346,427,832	281,135,805	81.15
Beban Pemeliharaan				
523111 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	146,203,970	60,770,700	85,433,270	140.58
523121 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	28,484,701	31,953,333	(3,468,632)	(10.85)
593113 Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	792,000	1,864,000	(1,072,000)	(57.51)
Jumlah Beban Pemeliharaan	175,480,671	94,588,033	80,892,638	85.52
Beban Perjalanan Dinas				
524111 Beban Perjalanan Biasa	41,770,864	21,660,000	20,110,864	92.84
Jumlah Beban Perjalanan Dinas	41,770,864	21,660,000	20,110,864	92.84
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat				
Beban Bunga				
Beban Subsidi				
Beban Hibah				
Beban Bantuan Sosial				
Beban Penyusutan dan Amortisasi				
591111 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	196,693,648	134,665,861	62,027,787	46.06
591211 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	34,877,909	34,877,909	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih				
Beban Transfer				
Beban Lain-Lain				
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	4,401,276,035	3,236,899,513	1,164,376,522	35.97
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(4,401,276,035)	(3,236,647,833)	(1,164,628,202)	(35.98)
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR				

**LAPORAN OPERASIONAL
 TINGKAT SATUAN KERJA**
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 WILAYAH/PROPINSI : 1100 SUMATERA SELATAN
 SATUAN KERJA : 401909 SATKER INI BELUM DIREKAM

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2020	2019	Jumlah	%
1	2	3	4	5
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar				
Beban Pelepasan Aset Non Lancar				
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0.00
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
Jumlah Surplus/(defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0.00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA				
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
425911 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	7,675,000	(7,675,000)	(100.00)
491511 Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	603,000	0	603,000	0.00
Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	603,000	7,675,000	(7,072,000)	(92.14)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	162,000	15,000	147,000	980.00
Jumlah Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	162,000	15,000	147,000	980.00
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	441,000	7,660,000	(7,219,000)	(94.24)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	441,000	7,660,000	(7,219,000)	(94.24)
POS LUAR BIASA				
Beban Luar Biasa				
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA	0	0	0	0.00
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(4,400,835,035)	(3,228,987,833)	(1,171,847,202)	(36.29)

Pangkalan Balai, 31 Desember 2020
 Sekretaris

Endang Erendi S.E.,M.M
 NIP. 19840913 200904 1 002

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
 UNTUK SEMESTER YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020
 (DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
 ESELON I : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 WILAYAH/PROPINSI : 1100 SUMATERA SELATAN
 SATUAN KERJA : 401909 SATKER INI BELUM DIREKAM
 JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				
	1. PENERIMAAN DALAM NEGERI	0	0	0	0.00
	a. Penerimaan Perpajakan	0	0	0	0.00
	b. Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	0	0	0.00
	2. HIBAH	0	0	0	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	0	0	0	0.00
B	BELANJA				
	Belanja Pegawai	3,451,053,000	3,288,043,306	(163,009,694)	95.28
	Belanja Barang	901,682,000	877,055,304	(24,626,696)	97.27
	Belanja Modal	5,410,504,000	5,354,077,115	(56,426,885)	98.96
	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00
	Subsidi	0	0	0	0.00
	Hibah	0	0	0	0.00
	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00
	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00
	JUMLAH BELANJA	9,763,239,000	9,519,175,725	(244,063,275)	97.50
C	PEMBIAYAAN				
	1. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00
	a. Perbankan Dalam Negeri	0	0	0	0.00
	b. Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	0	0	0	0.00
	2. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00
	a. Penarikan Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	0.00
	b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	0	0	0	0.00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	0	0	0	0.00

Pangkalan Balai, 31 Desember 2020

Sekretaris



Endang Efendi S.E., M.M
 NIP. 19840913 200904 1 002

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2020
(DALAM RUPIAH)**

Kode Laporan: NPSAIKT
Tanggal : 30-03-21
Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROPINSI : 1100 SUMATERA SELATAN
SATUAN KERJA : 401909 SATKER INI BELUM DIREKAM

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0	117111	Barang Konsumsi	12,865,000	
0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	2,373,000	
0	131111	Tanah	2,819,580,000	
0	132111	Peralatan dan Mesin	958,157,620	
0	133111	Gedung dan Bangunan	383,657,000	
0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	5,255,677,115	
0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		368,045,832
0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		104,633,728
0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar		18,668,000
0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar		3,682,904
0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		9,519,175,725
0	313221	Transfer Masuk		1,715,139,000
0	391111	Ekuitas		2,103,799,581
3	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan		603,000
3	511111	Beban Gaji Pokok PNS	1,414,536,560	
3	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	26,349	
3	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS		140
3	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	98,519,124	
3	511122	Beban Tunj. Anak PNS	28,078,020	
3	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	28,140,000	
3	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	1,232,990,000	
3	511125	Beban Tunj. PPh PNS	115,294,490	
3	511126	Beban Tunj. Beras PNS	72,420,000	
3	511129	Beban Uang Makan PNS	292,312,000	
3	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	25,135,000	
3	511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS		740,097
3	521111	Beban Keperluan Perkantoran	401,304,303	
3	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3,494,000	
3	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	39,600,000	
3	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	28,425,000	
3	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	25,932,000	
3	522111	Beban Langganan Listrik	25,604,960	
3	522112	Beban Langganan Telepon	10,148,374	

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2020
(DALAM RUPIAH)**

Kode Laporan: NPSAIKT
Tanggal : 30-03-21
Halaman : 2

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROPINSI : 1100 SUMATERA SELATAN
SATUAN KERJA : 401909 SATKER INI BELUM DIREKAM

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3	522113	Beban Langganan Air	7,375,000	
3	522141	Beban Sewa	85,680,000	
3	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	146,203,970	
3	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	28,484,701	
3	524111	Beban Perjalanan Biasa	41,770,864	
3	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	196,693,648	
3	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	34,877,909	
3	593111	Beban Persediaan konsumsi	18,178,000	
3	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	792,000	
3	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	162,000	
		J U M L A H	13,834,488,007	13,834,488,007

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2020
(DALAM RUPIAH)**

Kode Laporan: NPSAIKT
Tanggal : 30-03-21
Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROPINSI : 1100 SUMATERA SELATAN
SATUAN KERJA : 401909 SATKER INI BELUM DIREKAM

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0	115612	Piutang dari KPPN	244,063,275	
2	511111	Allotment Belanja Gaji Pokok PNS		1,414,541,000
2	511119	Allotment Belanja Pembulatan Gaji PNS		27,000
2	511121	Allotment Belanja Tunj. Suami/Istri PNS		98,520,000
2	511122	Allotment Belanja Tunj. Anak PNS		28,079,000
2	511123	Allotment Belanja Tunj. Struktural PNS		28,141,000
2	511124	Allotment Belanja Tunj. Fungsional PNS		1,233,081,000
2	511125	Allotment Belanja Tunj. PPh PNS		142,575,000
2	511126	Allotment Belanja Tunj. Beras PNS		78,141,000
2	511129	Allotment Belanja Uang Makan PNS		351,648,000
2	511151	Allotment Belanja Tunjangan Umum PNS		76,300,000
2	521111	Allotment Belanja Keperluan Perkantoran		401,520,000
2	521114	Allotment Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat		3,840,000
2	521115	Allotment Belanja Honor Operasional Satuan Kerja		39,600,000
2	521119	Allotment Belanja Barang Operasional Lainnya		30,150,000
2	521131	Allotment Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19		36,312,000
2	521811	Allotment Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi		33,810,000
2	522111	Allotment Belanja Langganan Listrik		27,600,000
2	522112	Allotment Belanja Langganan Telepon		10,590,000
2	522113	Allotment Belanja Langganan Air		7,200,000
2	522141	Allotment Belanja Sewa		85,680,000
2	523111	Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		146,280,000
2	523121	Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		34,700,000
2	524111	Allotment Belanja Perjalanan Biasa		44,400,000
2	532111	Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin		100,000,000
2	533111	Allotment Belanja Modal Gedung dan Bangunan		5,310,504,000
3	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,414,536,560	
3	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	26,349	
3	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS		140
3	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	98,519,124	
3	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	28,078,020	
3	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	28,140,000	
3	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,232,990,000	

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2020
(DALAM RUPIAH)**

Kode Laporan: NPSAIKT
Tanggal : 30-03-21
Halaman : 2

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROPINSI : 1100 SUMATERA SELATAN
SATUAN KERJA : 401909 SATKER INI BELUM DIREKAM

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	115,294,490	
3	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	72,420,000	
3	511129	Belanja Uang Makan PNS	273,644,000	
3	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	25,135,000	
3	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS		740,097
3	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	401,304,303	
3	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3,494,000	
3	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	39,600,000	
3	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	28,425,000	
3	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	25,932,000	
3	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	33,767,000	
3	522111	Belanja Langganan Listrik	25,609,884	
3	522112	Belanja Langganan Telepon	10,153,582	
3	522113	Belanja Langganan Air	6,630,000	
3	522141	Belanja Sewa	85,680,000	
3	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	146,203,970	
3	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	28,484,701	
3	524111	Belanja Perjalanan Biasa	41,770,864	
3	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	98,400,000	
3	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5,255,677,115	
		J U M L A H	9,763,979,237	9,763,979,237

LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA
PENGEMBALIAN BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2020
 (dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/005 : MAHKAMAH AGUNG
 ESELON I : 01 : BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 WILAYAH/PROVINSI : 1100 : SUMATERA SELATAN
 SATUAN KERJA : 401909 : SATKER INI BELUM DIREKAM
 JENIS SATUAN KERJA : KD : KANTOR DAERAH

Kode Lap. : LRBST 01
 Tanggal : 30-03-21
 Halaman : 1
 Prog.Id : lu_lapbsktkh

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH SID SEMESTER YANG LALU	SEMESTER INI	JUMLAH SID SEMESTER INI		
1	TRANSAKSI/KAS	0	0	140	0	140	0,00	0
01	RUPIAH MURNI	0	0	740.097	0	740.097	0,00	0
0	RM	0	0	740.237	0	740.237	0,00	0
03	KETERIBAN DAN KEAMANAN	0	0	740.237	0	740.237	0,00	0
04	PERADILAN	0	0	740.237	0	740.237	0,00	0
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	0	0	740.237	0	740.237	0,00	0
	Maahkamah Agung	0	0	740.237	0	740.237	0,00	0
1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	0	0	740.237	0	740.237	0,00	0
994	Layanan Perkantoran	0	0	740.237	0	740.237	0,00	0
51	PENGEMBALIAN BELANJA PEGAWAI	0	0	740.237	0	740.237	0,00	0
5111	Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	0	0	740.237	0	740.237	0,00	0
511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	0	740.237	0	740.237	0,00	0
511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	0	740.237	0	740.237	0,00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5111	0	0	140	0	140	0,00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN KELOMPOK BELANJA 51	0	0	740.097	0	740.097	0,00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA OUTPUT 1066 994	0	0	740.237	0	740.237	0,00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA KEGIATAN 1066	0	0	740.237	0	740.237	0,00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA PROGRAM 03 04 01	0	0	740.237	0	740.237	0,00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI 03 04	0	0	740.237	0	740.237	0,00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA FUNGSI 03	0	0	740.237	0	740.237	0,00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA CARA PENAIKAN 0	0	0	740.237	0	740.237	0,00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUMBER DAYA 01	0	0	740.237	0	740.237	0,00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA JENIS SATKER KD	0	0	740.237	0	740.237	0,00	0
		0	0	740.237	0	740.237	0,00	0

**LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN
UNTUK TAHUN 2020
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
 ESELON I : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 WILAYAH/PROVINSI : 1100 SUMATERA SELATAN
 SATUAN KERJA : 401909 SATKER INI BELUM DIREKAM
 JENIS SATKER : XX Cek Tabel

KD. LAPORAN : LPPE.T01b
 TANGGAL : 30/03/21
 HAL : 1
 PROG. ID : lue_penblank

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENGEMBALIAN PENDAPATAN				% REAL. PEND
			JUMLAH SAMPAI DENGAN TAHUN INI	TAHUN INI	JUMLAH SAMPAI DENGAN TAHUN INI		
1	2	3	4	5	6	7	
			----- Tidak Ada Data Yang Dicetak -----				

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
 PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN
 UNTUK TAHUN 2020
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
 ESELON I : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 WILAYAH/PROPINSI : 1100 SUMATERA SELATAN
 SATUAN KERJA : 401909 SATKER INI BELUM DIREKAM
 JENIS SATKER : XX Cek Tabel

KD. LAPORAN : LRPS.T01
 TANGGAL : 30/03/21
 HAL : 1
 PROG. ID : lue_penblank

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN				% REAL. PEND
			TAHUN INI	JUMLAH SAMPAI DENGAN TAHUN INI	PENGEMBALIAN TAHUN INI	JUMLAH NETTO SAMPAI DENGAN TAHUN INI	
1	2	3	4	5	6	7	
				----- Tidak Ada Data Yang Dicetak -----			



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : SP DIPA- 005.01.2.401909/2020**



DS:1089-7462-0350-3003

Revisi ke 08

Tanggal : 23 Desember 2020

- A. Dasar Hukum:
- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 - UU No. 20 Tahun 2019 tentang APBN TA 2020

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (005)	MAHKAMAH AGUNG
2. Unit Organisasi	: (01)	BADAN URUSAN ADMINISTRASI
3. Provinsi	: (11)	SUMATERA SELATAN
4. Kode>Nama Saker	: (401909)	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
Sebesar	: Rp. 9.763.239.000	(SEMBILAN MILIAR TUJUH RATUS ENAM PULUH TIGA JUTA DUA RATUS TIGA PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.04 PERADILAN
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Terlampir

Jumlah Uang

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	9.763.239.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0
D. Pencairan dana dilakukan melalui :					
1. KPPN S E K A Y U	(160) Rp.	9.763.239.000			

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengamanan berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sakter dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

JAKARTA, 12 November 2019
AN MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

LAMPIRAN

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA-005.01.2.401909/2020**



DS:1089-7462-0350-3003

Satker : (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

		Rp.	
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung		4.352.735.000
01.1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.	4.352.735.000
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Rp.	5.410.504.000
02.1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	5.410.504.000

DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : DIPA- 005.01.2.401909/2020

IA. INFORMASI KINERJA



DS:1089-7462-0350-3003

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
 Kode/Nama Sakter : (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Kuasa Pengguna Anggaran : Endang Efendi
 Bendahara Pengeluaran : FITRIANI
 Pejabat Penanda Tangan SPM : RAHMAT JUNIANSYAH

Halaman : IA. 1

1 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN			9.763.239.000
Sub Fungsi	03.04	PERADILAN			9.763.239.000
2 Program	005.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung			4.352.735.000
Sasaran Program	01	Tercapainya Dukungan Manajemen untuk Layanan Prima Peradilan			
Indikator Kinerja Program	01	Meningkatnya pengelolaan pelayanan sistem informasi terintegrasi		16 Sistem Informasi	
	02	Meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter obyektif		1200 Kepegawaian	
	03	Meningkatnya pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya		45 Laporan Keuangan	
	04	Meningkatnya kualitas manajemen rencana program dan anggaran serta organisasi secara transparan, efektifitas dan efisien		10 Dokumen Perencanaan	
	05	Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana menunjang pelayanan peradilan		8 Layanan Pengelolaan	
	06	Terselenggaranya pelayanan pimpinan		12 Bulan Layanan	
	07	Meningkatnya pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga dan bina sikap mental SDM Mahkamah Agung		12 Bulan Layanan	
Output Program	01	Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung			
Indikator Output Program	01	Jumlah meningkatnya pengelolaan pelayanan sistem informasi terintegrasi		16 Sistem Informasi	
	02	Jumlah meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter obyektif		1200 Kepegawaian	
	03	Jumlah meningkatnya pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan peradilan yang berada dibawahnya		45 Laporan Keuangan	
	04	Jumlah meningkatnya kualitas manajemen rencana program dan anggaran serta organisasi secara transparan, efektifitas dan efisien		10 Dokumen Perencanaan	
	05	Jumlah peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana menunjang pelayanan peradilan		8 Layanan Pengelolaan	
	06	Jumlah terselenggaranya pelayanan pimpinan		12 Bulan Layanan	
	07	Jumlah meningkatkan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga dan bina sikap mental SDM Mahkamah Agung		12 Bulan Layanan	
Kegiatan	1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi			4.352.735.000
Sasaran Kegiatan	01	Pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel			
Indikator Kinerja Kegiatan	01	Penyusunan Laporan Keuangan			
	02	Indeks opini BPK atas Laporan Keuangan			
Output Kegiatan	1066.994	Layanan Perkantoran		1 Layanan	4.352.735.000
Indikator Output Kegiatan	01	Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan = xx%		95 Persentase	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA - 005.01.2.401909/2020
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:1089-7462-0350-3003

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
Kode/Nama Saker : (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Kuasa Pengguna Anggaran : Endang Elendi
Bendahara Pengeluaran : FITRIANI
Pejabat Penanda Tangan SPM : RAHMAT JUNIANSYAH

Halaman : IA.2

Indikator Output Kegiatan	02	Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor = xx%	91 Persentase
Program	005.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	5.410.504.000
Output Program	01	Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung	
Kegiatan	1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	5.410.504.000
Sasaran Kegiatan	01	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana dalam Mendukung Pelayanan Peradilan	
Output Kegiatan	1071.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Pengadaan kendaraan bermotor = xx unit	24 Unit
	02	Jumlah Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi = xx unit	2667 Unit
	03	Jumlah Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran = xx unit	2203 Unit
	04	Luas Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan = xx m2	197668,6 m2
	05	Luas Pengadaan tanah untuk pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan = xx m2	753 m2

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA - 005.01.2.401909/2020
I B. SUMBER DANA**



DS:1099-7462-0350-3003

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
Kode/Nama Satker : (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Halaman : I B. 1

1. Anggaran Tahun 2020		Rp.	9.763.239.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0	Ekuivalen Rupiah	0
1.	Rupiah Murni	Rp.	9.763.239.000		(2) RP/LN	US\$	0	Rp.	0		0
2.	PNBP	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0		0
3.	Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0		0
4.	Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0				
5.	Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0				
6.	SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0				
2. Rincian Pinjaman / Hibah :					f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0				

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register	PAGU TAHUN INI	RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN	DANA PENDAMPING	Pagu				
					Rp. Pdp	Rp. LN	Rp. Loc Cost		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri	1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah	1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -						
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 005.01.2.401909/2020
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:1099-7462-0350-3003

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
Kode/Nama Satker : (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA							LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
401909	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI	3.451.053	901.682	5.410.504	-	-	9.763.239			
005.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	3.451.053	901.682	-	-	-	4.352.735			
1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	3.451.053	901.682	-	-	-	4.352.735			
1066.994	Layanan Perkantoran	3.451.053	901.682	-	-	-	4.352.735	11.09		
01	RM	3.451.053	901.682	-	-	-	4.352.735	160		
005.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	-	-	5.410.504	-	-	5.410.504			
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	-	-	5.410.504	-	-	5.410.504			
1071.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	-	-	5.410.504	-	-	5.410.504	11.09		
01	RM	-	-	5.410.504	-	-	5.410.504	160		
JUMLAH		3.451.053	901.682	5.410.504	-	-	9.763.239			

JAKARTA, 12 November 2019
Wakil Ketua MA RI Bidang Non Yudisial selaku PA

td
Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 005.01.2.401909/2020
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:1089-7462-0350-3003

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
Kode/Nama Satker : (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	401909	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI													
		RENCANA PENARIKAN DANA	296.714	471.642	296.714	576.598	576.420	296.714	308.327	296.714	296.714	308.224	3.541.169	2.497.287	9.763.239
		51 BELANJA PEGAWAI	217.019	217.019	217.019	217.019	217.019	217.019	217.019	217.019	217.019	217.019	498.625	782.234	3.451.053
		52 BELANJA BARANG	71.295	71.295	71.295	71.295	71.295	71.295	82.907	71.295	71.295	82.805	82.805	82.805	901.682
		53 BELANJA MODAL	8.400	183.327	8.400	288.284	288.106	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	2.959.739	1.632.246	5.410.504
	005.01.01.1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	288.314	288.314	288.314	288.314	288.314	288.314	289.927	288.314	288.314	289.824	581.430	665.039	4.352.735
		51 BELANJA PEGAWAI	217.019	217.019	217.019	217.019	217.019	217.019	217.019	217.019	217.019	217.019	498.625	782.234	3.451.053
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	71.295	71.295	71.295	71.295	71.295	71.295	82.907	71.295	71.295	82.805	82.805	82.805	901.682
	005.01.02.1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	8.400	183.327	8.400	288.284	288.106	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	2.959.739	1.632.246	5.410.504
		53 BELANJA MODAL	8.400	183.327	8.400	288.284	288.106	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	2.959.739	1.632.246	5.410.504

JAKARTA, 12 November 2019
Wakil Ketua MA RI Bidang Non Yudisial selaku PA

ttt.
Dr. H. Sumarto, S.H., M.H.

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 005.01.2.401909/2020
IV.A. B L O K I R**



DS:1099-7482-0350-3003

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [01] BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Provinsi : [11] SUMATERA SELATAN
Kode dan Nama Saker : [401909] PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

JAKARTA, 12 November 2019
Wakil Ketua MA RI Bidang Non Yudisial selaku PA

td.
Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 005.01.2.401909/2020
IV.B. C A T A T A N**



DS:1089-7462-0350-3003

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [01] BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Provinsi : [11] SUMATERA SELATAN
Kode dan Nama Saker : [401909] PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
401909	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI		
005.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung		
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung		
1071.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan * Pembangunan Gedung Kantor Baru seluas 2.496 m2		
		Rp.	5.310.504
		Rp.	5.310.504

JAKARTA, 12 November 2019
Wakil Ketua MA RI Bidang Non Yudisial selaku PA

td.
Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2020 (REVISI KE-8)

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
 UNIT KERJA (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
 ALOKASI Rp.9,763,239,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
005.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung			4,352,735,000	
1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi			4,352,735,000	
1066.994	Layanan Perkantoran	1.0 Layanan		4,352,735,000	
	Lokasi : KAB. BANYUASIN				
1066.994.001	Tanpa Sub Output			4,352,735,000	
001	Gaji dan Tunjangan			3,451,053,000	
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan			3,451,053,000	
511111	<u>Belanja Gaji Pokok PNS</u> (KPPN.160-Sekayu)			1,414,541,000	RM
	- Belanja Gaji Pokok PNS	1.0 THN	1,212,755,000	1,212,755,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	100,893,000	100,893,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	100,893,000	100,893,000	
511119	<u>Belanja Pembulatan Gaji PNS</u> (KPPN.160-Sekayu)			27,000	RM
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.0 THN	23,000	23,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,000	2,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,000	2,000	
511121	<u>Belanja Tunj. Suami/Istri PNS</u> (KPPN.160-Sekayu)			98,520,000	RM
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.0 THN	86,526,000	86,526,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	5,997,000	5,997,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	5,997,000	5,997,000	
511122	<u>Belanja Tunj. Anak PNS</u> (KPPN.160-Sekayu)			28,079,000	RM
	- Belanja Tunj. Anak PNS	1.0 THN	24,229,000	24,229,000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	1,925,000	1,925,000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	1,925,000	1,925,000	
511123	<u>Belanja Tunj. Struktural PNS</u> (KPPN.160-Sekayu)			28,141,000	RM
	- Belanja Tunj. Struktural PNS	1.0 THN	24,121,000	24,121,000	
	- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,010,000	2,010,000	
	- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,010,000	2,010,000	
511124	<u>Belanja Tunj. Fungsional PNS</u> (KPPN.160-Sekayu)			1,233,081,000	RM
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.0 THN	1,101,941,000	1,101,941,000	
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	65,570,000	65,570,000	
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	65,570,000	65,570,000	
511125	<u>Belanja Tunj. PPh PNS</u> (KPPN.160-Sekayu)			142,575,000	RM
	- Belanja Tunj. PPh PNS	1.0 THN	122,207,000	122,207,000	
	- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	10,184,000	10,184,000	
	- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	10,184,000	10,184,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2020 (REVISI KE-8)

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
 UNIT KERJA (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
 ALOKASI Rp.9,763,239,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511126	<u>Belanja Tunj. Beras PNS</u> (KPPN.160-Sekayu) - Belanja Tunj. Beras PNS	1.0 THN	78,141,000	78,141,000	RM
511129	<u>Belanja Uang Makan PNS</u> (KPPN.160-Sekayu) - Belanja Uang Makan PNS	1.0 THN	351,648,000	351,648,000	RM
511151	<u>Belanja Tunjangan Umum PNS</u> (KPPN.160-Sekayu) - Belanja Tunjangan Umum PNS - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN	65,400,000 5,450,000 5,450,000	76,300,000 65,400,000 5,450,000 5,450,000	RM
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			901,682,000	
A	<i>Keperluan Perkantoran Sehari-hari</i>			<i>278,130,000</i>	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.160-Sekayu) - Honor pegawai tidak tetap 8 ORG x 13 BLN [8 ORG x 13 BLN]	104.0 OB	2,330,000	242,320,000	RM
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.160-Sekayu) - Belanja barang operasional lainnya	1.0 THN	2,000,000	2,000,000	RM
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.160-Sekayu) - Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran (ATK,bahan cetakan, alat rumah tangga, dll)	1.0 THN	33,810,000	33,810,000	RM
B	<i>Langganan daya dan Jasa</i>			<i>208,430,000</i>	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.160-Sekayu) - Langganan Internet - Web Hosting	1.0 THN 1.0 THN	156,000,000 3,200,000	159,200,000 156,000,000 3,200,000	RM
521114	<u>Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</u> (KPPN.160-Sekayu) - Belanja pengiriman surat dinas pos pusat	12.0 BLN	320,000	3,840,000	RM
522111	<u>Belanja Langganan Listrik</u> (KPPN.160-Sekayu) - Langganan Listrik	12.0 BLN	2,300,000	27,600,000	RM
522112	<u>Belanja Langganan Telepon</u> (KPPN.160-Sekayu) - Langganan Telpn	12.0 BLN	882,500	10,590,000	RM
522113	<u>Belanja Langganan Air</u> (KPPN.160-Sekayu) - Langganan Air	12.0 BLN	600,000	7,200,000	RM
C	<i>Pemeliharaan Kantor</i>			<i>180,980,000</i>	
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.160-Sekayu) - Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (Perawatan	800.0 M2	182,850	146,280,000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2020 (REVISI KE-8)

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
 UNIT KERJA (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
 ALOKASI Rp.9,763,239,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
523121	Gedung, Pemeliharaan Jaringan)	800.0 M2	182,850	146,280,000	RM
	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u>			34,700,000	
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Perawatan AC 6 UNIT x 1 THN [6 UNIT x 1 THN]	6.0 UT	750,000	4,500,000	
	- Perawatan Laptop	5.0 UNIT	300,000	1,500,000	
	- Pemeliharaan kendaraan roda 4	1.0 UNIT	20,000,000	20,000,000	
	- Pemeliharaan Kendaraan roda 2	2.0 UNIT	3,000,000	6,000,000	
	- Perawatan Komputer	4.0 UNIT	300,000	1,200,000	
	- Perawatan Printer	4.0 UNIT	375,000	1,500,000	
D	<i>Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor</i>			61,600,000	
521115	<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u>			39,600,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 1 ORG x 12 BLN [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	700,000	8,400,000	
	- Honorarium Pejabat penguji SPP dan Penandatanganan SPM 1 ORG x 12 BLN [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	600,000	7,200,000	
	- Honorarium Bendahara 1 ORG x 12 BLN [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	650,000	7,800,000	
	- Honorarium Pengelola Keuangan 3 ORG x 12 BLN [3 ORG x 12 BLN]	36.0 OB	450,000	16,200,000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u>			22,000,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Pakaian Dinas Pegawai 30 ORG x 1 STEL [30 ORG x 1 STEL]	30.0 STEL	600,000	18,000,000	
	- Pakaian Dinas Honorar/pegawai tidak tetap 8 ORG x 1 STEL [8 ORG x 1 STEL]	8.0 STEL	500,000	4,000,000	
E	<i>Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim</i>			85,680,000	
522141	<u>Belanja Sewa</u>			85,680,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Bantuan Sewa Rumah Dinas Hakim 7 ORG x 1 THN [7 ORG x 1 THN]	7.0 OT	12,240,000	85,680,000	
F	<i>Konsultasi Ke Pusat/Tingkat Banding</i>			17,600,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>			17,600,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Transport 4 ORG x 1 PP x 11 KEG [4 ORG x 1 PP x 11 KEG]	44.0 OK	100,000	4,400,000	
	- Uang Harian 4 ORG x 1 HARI x 11 KEG [4 ORG x 1 HARI x 11 KEG]	44.0 OH	300,000	13,200,000	
G	<i>Penanganan Pandemi Covid-19</i>			36,312,000	
521131	<u>Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19</u>			36,312,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Pembelian APD dan Vitamin Untuk Penanganan Pandemic Covid-19	1.0 KEG	36,312,000	36,312,000	
I	<i>Konsultasi, Rekonsiliasi SIMAK, SPM, Revisi Anggaran ke KPPN/KPKNL/KANWIL/DJA</i>			26,800,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>			26,800,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Transport 2 ORG x 1 PP x 12 KEG [2 ORG x 1 PP x 12 KEG]	24.0 OK	100,000	2,400,000	
	- Uang Harian 2 ORG x 1 HARI x 12 KEG [2 ORG x 1 HARI x 12 KEG]	24.0 OH	300,000	7,200,000	
	- Tambahan perjalanin	1.0 THN	17,200,000	17,200,000	
J	<i>Pencegahan Pemberantasan dan Peredaran Gelap Narkoba</i>			6,150,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2020 (REVISI KE-8)

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
 UNIT KERJA (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
 ALOKASI Rp.9,763,239,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.160-Sekayu)			6,150,000	RM
	- Tes Urine	41.0 ORG	150,000	6,150,000	
005.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung			5,410,504,000	RM
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung			5,410,504,000	
1071.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.0 Layanan		5,410,504,000	
	Lokasi : KAB. BANYUASIN				
1071.951.001	Tanpa Sub Output			5,410,504,000	
052	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi			100,000,000	RM
A	Alat Pengolah Data Pendukung Kepaniteraan			100,000,000	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.160-Sekayu)			100,000,000	RM
	- PC Komputer untuk Panitera	8.0 UNIT	12,500,000	100,000,000	
054	Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan			5,310,504,000	RM
A	Pembangunan Gedung Baru			5,310,504,000	
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan (KPPN.160-Sekayu)			5,310,504,000	RM
	- Pembangunan Gedung Baru	499.0 M2	8,442,152	4,212,633,000	
	- Konsultan Perencana	1.0 KEG	771,246,000	771,246,000	
	- Konsultan Pengawas	1.0 KEG	196,624,000	196,624,000	
	- Biaya Pengelola Kegiatan	1.0 KEG	130,001,000	130,001,000	

Catatan : 1. U = Komponen Utama
 2. P = Komponen Penunjang
 3. * = Blokir

Pangkalan Balai, 4 Mei 2021


 Endang Erendi
 NIP 198409132009041002

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA SEMESTERAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL, EKSTRAKOMPTABEL DAN AMORTISASI
RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG
SEMESTER II
TAHUN ANGGARAN 2020

NAMA UAKPB : 005.01.11.401909 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI 01

AKUN NERACA/SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 31 DESEMBER 2020							NILAI BUKU
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AK. PENYUSUTAN S.D PERIODE INI	BEBAN PENYUSUTAN PERIODE INI	AK. PENYUSUTAN PERIODE INI	TOT. AK. PENYUSUTAN S.D PERIODE INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
132111	PERALATAN DAN MESIN		171	986,399,270	181,816,349	201,741,978	0	383,558,327	602,840,943	
3.02.01.02	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG	Unit	1	239,368,000	34,195,428	34,195,428	0	68,390,856	170,977,144	
3.02.01.04	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	Unit	2	58,950,000	6,935,714	8,421,428	0	15,357,142	43,592,858	
3.03.02.05	PERKAKAS STANDARD (STANDARD TOOLS)	Buah	1	541,650	54,165	108,330	0	162,495	379,155	
3.05.01.04	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	Buah	15	57,200,000	17,160,000	11,440,000	0	28,600,000	28,600,000	
3.05.01.05	ALAT KANTOR LAINNYA	Buah	1	5,500,000	1,650,000	1,100,000	0	2,750,000	2,750,000	
3.05.02.01	MEUBELAIR	Buah	101	92,520,000	35,422,500	16,455,000	0	51,877,500	40,642,500	
3.05.02.04	ALAT PENDINGIN	Buah	6	30,000,000	9,000,000	6,000,000	0	15,000,000	15,000,000	
3.05.02.06	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	Buah	2	150,000	150,000	0	0	150,000	0	
3.06.01.01	PERALATAN STUDIO AUDIO	Buah	4	10,136,000	1,013,600	2,027,200	0	3,040,800	7,095,200	
3.06.01.02	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	Buah	1	1,100,000	330,000	220,000	0	550,000	550,000	
3.08.01.41	ALAT LABORATORIUM PERTANIAN	Buah	1	7,670,500	479,406	958,812	0	1,438,218	6,232,282	
3.10.01.01	KOMPUTER JARINGAN	Buah	10	151,775,600	6,671,950	37,943,900	0	44,615,850	107,159,750	
3.10.01.02	PERSONAL KOMPUTER	Buah	13	149,115,680	34,430,980	37,278,920	0	71,709,900	77,405,780	
3.10.02.03	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	Buah	4	8,000,000	3,000,000	2,000,000	0	5,000,000	3,000,000	
3.10.02.04	PERALATAN JARINGAN	Buah	9	174,371,840	31,322,606	43,592,960	0	74,915,566	99,456,274	
133111	GEDUNG DAN BANGUNAN		1	310,781,000	69,755,819	30,591,086	0	100,346,905	210,434,095	
4.01.01.24	BANGUNAN TEMPAT PERSIDANGAN	Unit	1	310,781,000	69,755,819	30,591,086	0	100,346,905	210,434,095	
	TOTAL			1,297,180,270	251,572,168	232,333,064	0	483,905,232	813,275,038	

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA SEMESTERAN
 GABUNGAN INTRAKOMPTABEL, EKSTRAKOMPTABEL DAN AMORTISASI
 RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG
 SEMESTER II
 TAHUN ANGGARAN 2020

NAMA UAKPB : 005.01.11.401909 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI 01

KODE	URAIAN	SAT	SALDO PER 31 DESEMBER 2020					TOT. AK. PENYUSUTAN S.D PERIODE INI	NILAI BUKU
			AK. PENYUSUTAN S.D PERIODE INI	BEBAN PENYUSUTAN PERIODE INI	AK. PENYUSUTAN PERIODE INI	TOT. AK. PENYUSUTAN S.D PERIODE INI	AK. PENYUSUTAN PERIODE INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

PANGKALAN BALAI, 27 Januari 2021

Penanggung Jawab UAKPB
 KUASA PENGGUNA BARANG
 ENDANG EFFENDI, S.E., M.M.
 198409132009041002

